



BULETIN VIRA JATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD

Edisi XXI JUNI 2022

SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani



MEDIAWEEK

Menyiapkan Pamen TNI AD sebagai
Komandan dan Staf Perang



PRAKATA

BULETIN VIRAJATI

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke-21 Juni 2022, kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan, menarik dan bermanfaat.

Buletin Virajati kali ini mengangkat tema “**Media Week, Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Publik Perwira TNI AD**”. Tema ini diangkat dari Kegiatan Media Week sebagai salah satu program unggulan pada Dikreg LXII Seskoad Tahun 2022. Kegiatan Media Week yang baru pertama kali dilakukan ini merupakan ide pemikiran dan inisiasi Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., yang menginginkan agar Pasis keluaran Seskoad memiliki kemampuan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik bertajuk Media Week kerja sama *Media Academy*, *Media Group Network* dengan Seskoad ini berlangsung selama 5 hari, yakni tanggal 13 s.d. 17 Juni 2022, di Seskoad Bandung. Kegiatan Media Week yang diikuti 274 Pasis Seskoad, termasuk 10 Pasis Negara Sahabat bertujuan agar Pasis Seskoad memiliki kemampuan dan performance dalam mengaplikasikan pengetahuan jurnalistik dan komunikasi publik.

Selain mengulas tema utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan yang menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi pembaca, yakni Kemampuan Deteksi Dini Personel Intelijen dalam Mencegah Konflik Sosial, Pembinaan Teritorial dalam rangka Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Guna Mendukung Kesatuan Bangsa, serta Pemberdayaan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan sejumlah negara di berbagai belahan dunia, seperti Negara Swiss, Negara Brunei Darussalam, Negara China, Negara Kolombia, Negara Portugal serta sejumlah negara lainnya

Semoga berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Redaksi

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, MA.

Pembina

Brigjen TNI Refrizal

Penasehat

Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos

Redaktur Pelaksana

Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo, S. Sos.

Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si.

Sekretaris Redaksi

Mayor Arm Nicolas Da Silva S.Sos., M.Si.

Staf Redaksi

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Mayor Inf Gede Agus Dian P., S.Sos., MMDS.

Letda Chb R. Caturino

PNS Apep Saripudin

Reporter

Letda Inf Asmadi

Sertu Susilo

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

PNS Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad, Jl. Jend Gatot Subroto 96 Bdg.

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<https://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<http://www.facebook.com/buletinvirajati>

Instagram

<http://www.instagram.com/buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam “Jurnal Virajati” adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam “Jurnal Virajati” merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi

Wawancara Talkshow TV

MEDIA WEEK

Menyiapkan Pamen TNI AD sebagai
Komandan dan Staf Perang

DAFTAR ISI

MEDIA WEEK, PERWIRA TNI AD TINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tim Redaksi Buletin Virajati Seskoad

4

29

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN CHINA

Mayor Ctp Samsul Hadi, S.Sos., M.M.

KEMAMPUAN DETEKSI DINI PERSONEL INTELIJEN DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantyo, M.M.

7

34

KONSEP PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN MELALUI PENERAPAN WAJIB MILITER DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA KOLOMBIA

.Mayor Cpl Arief Hernawan, S.T.

PEMBINAAN TERITORIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GUNA MENDUKUNG KESATUAN BANGSA

Letkol Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc

11

41

PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN PORTUGAL PASCA PENGHENTIAN PROGRAM WAJIB MILITER

Mayor Inf Billy Adriadi Pradita Iskandar

PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA SWISS

Kompol James I.S. Rajagukguk, S.I.K.

16

47

PERAN NEGARA DENMARK DALAM MENCiptakan KOMPONEN CADANGAN DALAM RANGKA PERTAHANAN NEGARA

Mayor Inf Darmawan Hendra Wijaya

PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM PERSpektif ANGKATAN BERSENJATA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Major Cba Ahmad Maulana, S.E.

21

52

PERAN DAN PENGGUNAAN RESERVE PERSONNEL (KOMPONEN CADANGAN) DALAM SISTEM PERTAHANAN REPUBLIK SIPRUS

Major Inf Acuk Andrianto, S.E



GRHA WIYATA YUDDHA

MEDIA WEEK, PERWIRA TNI AD TINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tim Redaksi Buletin Virajati Seskoad



PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jurnalistik semakin berkembang, terutama di bidang komunikasi yang semakin canggih. Sehingga menjadi sebuah tuntutan untuk kita agar melatih kemampuan dalam hal jurnalistik dan public speaking. Harapannya, keluaran Dikreg Seskoad memiliki pengetahuan dan aplikasi jurnalistik serta komunikasi publik yang mumpuni.

Demikian dikatakan Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., dalam amanat tertulis yang dibacakan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad Letjen TNI Afifi Boer yang mewakili Kasad, pada penutupan kegiatan Media Week Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXII Seskoad TA 2022, bertempat di Gedung Gatot Soebroto, Seskoad, Bandung, Jumat (17/6/2022) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Seskoad dan Media Group atas terselenggaranya kegiatan Media Week. Kasad menilai tuntutan publik akan informasi yang transparan dari instansi pemerintah, termasuk militer, adalah hal yang wajar di era keterbukaan informasi seperti saat ini.

"Kemajuan teknologi informasi dan media sosial yang memicu lalu lintas berita menjadi hanya dalam hitungan detik, membuat TNI AD harus melakukan inovasi dan improvisasi dalam menyiapkan SDM Perwira khususnya,

agar sanggup beradaptasi dengan kondisi dan situasi terkini," ujarnya.

Untuk itu, menurut Kasad Seskoad sebagai satuan yang bertugas pokok menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI Angkatan Darat, bekerja sama dengan Media Academy atau Yayasan Surya Citra Bangsa untuk mengadakan kegiatan Media Week dengan materi public speaking dan media handling. Tujuannya, untuk memaksimalkan peran dan fungsi komunikasi, diantaranya penyampaian agenda terhadap media, teknik wawancara langsung maupun diskusi publik.

"Dari pelatihan ini, diharapkan para Perwira Siswa calon pemimpin di Angkatan Darat dapat melakukan komunikasi publik yang baik, serta luwes saat tampil atau berdialog dengan wartawan/media," sambung Kasad.

Sementara itu, CEO Media Group Network selaku Ketua Yayasan Media Academy, Mohammad Mirdal Aqib, menilai bahwa kerjasama antara TNI dan Media Academy merupakan hal istimewa karena turut berkontribusi mendukung kemajuan para perwira Siswa Seskoad yang handal di masa depan. "Media Week merupakan pelatihan jurnalistik yang baru tahun ini diberikan kepada siswa Dikreg Seskoad", ujarnya.

Lebih lanjut, CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa bangga dan berterima kasih karena

telah dilibatkan dalam program yang sangat bermanfaat ini. Terlebih lagi, karena 274 Pasis Seskoad, termasuk yang mengikuti program Media Week ini merupakan orang-orang pilihan dari 270 juta penduduk yang ada di Indonesia, dan kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat.

“274 orang ini adalah bagian dari yang akan membawa bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang merubah peradaban dunia, dan menjadi pemain dalam percaturan global,” ujarnya seraya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara “membayar hutang” kepada para pejuang kemerdekaan yang telah gugur.

“Karena berkat mereka semua, kita dapat menikmati semua fasilitas Republik ini, dan kenyamanan yang dimiliki oleh bangsa ini,” lanjutnya sembari menekankan bahwa pembentukan karakter pemuda Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Seskoad, menjadi krusial dalam mewujudkan hal tersebut.



Ke depannya, kegiatan Media Week ini diharapkan dapat dilanjutkan pada Dikreg Seskoad berikutnya, mengingat manfaatnya yang besar dalam membantu para Perwira TNI AD menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan tugas yang menantinya di medan tugasnya kelak.

“Hadir di Seskoad, melihat proses Pendidikan disini, seperti melihat masa depan bangsa sedang dibentuk. Menyaksikan generasi-generasi pilihan ditempa dengan kurikulum yang menghantarkan menjadi pemimpin bangsa. Terima kasih Danseskoad sudah memberikan kontribusi Media Grup dalam proses ini”, ungkapnya. Perlu diketahui bahwa kegiatan *Media Week* ini merupakan

ide pemikiran dan inisiasi Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., yang menginginkan agar perwira siswa (Pasis) keluaran Seskoad memiliki kemampuan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik bertajuk *Media Week* ini merupakan kerja sama *Media Academy*, *Media Group Network*, dengan Seskoad. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari, yakni 13 s.d. 17 Juni 2022 dan diikuti 274 Pasis Seskoad (terdiri dari 241 Pasis TNI AD, 2 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AU, 19 Pasis Polri dan 10 Pasis Negara Sahabat), bertujuan agar Pasis Seskoad memiliki kemampuan dan *performance* dalam mengaplikasikan pengetahuan jurnalistik dan komunikasi public.

Adapun sasarannya adalah agar Pasis Seskoad mempunyai kemampuan *public speaking* yang baik; mempunyai keterampilan *leadership skill* yang mumpuni; mampu menyusun dan menyajikan *press release* secara benar dan proporsional; dan mampu menggelar *press conference* dan *media crisis center* secara profesional.

Sedangkan materi pelatihan meliputi : Relasi TNI dan Media, Menghadapi Wawancara Media dan *Talkshow*, *The Power of Public Speaking*, Hukum dan Peraturan Pers, Menggelar Konferensi Pers dan *How to Handle The Audience*, *Improve Your Communication Technique*, Manajemen *Media Crisis Center*, *Videography* dan *Editing*, Wawancara *Doorstop*, dan Wawancara Televisi/*Talkshow*.

Sebelum melakukan penutupan kegiatan *Media Week*, Koorsahli Kasad dan CEO *Media Group Network* M Mirdal Aqib, dengan didampingi Danseskoad dan para pejabat TNI AD diantaranya Danpussenif Kodiklatad, Wadankodiklatad, Wadan Seskoad, Kasdam III/Siliwangi, para Asisten Kasad, Dansecapaad, dan Pejabat.

Sementara itu, Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., ditempat yang sama ketika membuka kegiatan *Media Week*, pada Senin (13/06/2022), menyampaikan bersyukur Seskoad dapat menjalin kerja sama dengan

Media Academy dalam meningkatkan kemampuan para Pasis Seskoad. Danseskoad berharap melalui pengetahuan jurnalistik yang diberikan dalam media week ini, nantinya para Pasis Seskoad akan memiliki kemampuan berbicara kepada khalayak ataupun wartawan, serta dapat mengelola media sosial dengan baik.



"Saya berharap melalui kegiatan Media Week ini, para Pasis Seskoad dapat mengikuti dan memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga memiliki *performance* dalam mengaplikasikan pengetahuan jurnalistik dan komunikasi public. Dengan demikian para prajurit TNI sudah terbiasa behadapan dengan wartawan sehingga informasi yang beredar semakin positif. Prajurit TNI harus mampu menyajikan informasi-informasi yang positif baik di daerah konflik maupun kesatuannya masing-masing," ungkapnya.

Sementara, Direktur pemberitaan Metro TV Arief Suditomo yang mewakili CEO Metro TV Mohammad Mirdal Aqib, dalam sambutannya pada acara pembukaan Media Week menyatakan bahwa Institusi TNI harus lebih aktif dalam menggunakan media sosial, terutama di era digitalisasi seperti sekarang.

Arif Suditomo, yang menjadi pemateri pertama pada Kegiatan Media Week dengan judul "Relasi TNI dan Media" menjelaskan bahwa di era digital saat ini, penyebaran informasi sangat cepat. Parahnya lagi.

saat ini siapa pun bisa menjadi sumber dan pelaku penyebarluasan informasi dengan hadirnya media sosial. "Buat organisasi angkatan bersenjata, media sosial adalah hal yang sangat penting. Harus bisa dimanfaatkan dengan baik karena itu, Institusi TNI harus lebih aktif dalam menggunakan media sosial terutama di era digitalisasi sekarang.

Hal ini sangat penting untuk mencegah meluasnya penyebaran informasi bohong, khususnya yang menyangkut pertahanan dan keutuhan negara.

Arif Suditomo menambahkan bahwa pertempuran saat ini dan di masa yang akan datang, tidak hanya sebatas menggunakan senjata, melainkan juga perang informasi. Sebagai contoh, misi pertahanan yang dilakukan TNI terhadap kelompok separatis sering kali disalahartikan sebagai pelanggaran HAM. Ini bisa terjadi karena minimnya informasi penyeimbang yang dilakukan TNI. "Berita negatif jangan ditakuti. Tapi harus dilawan dengan berita positif," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya, TNI maupun instansi manapun harus lebih aktif dalam menyampaikan informasi baik melalui media arus utama maupun media sosial. Pada kesempatan itu, Arif juga menjelaskan berbagai hal tentang pengelolaan informasi baik melalui media arus utama maupun media sosial. "Bila ingin menyelami media arus utama dan media sosial, kita harus berada pada titik yang sudah menjalani sebagai pemilik akun. Pengisi, pembuat konten, dan pihak-pihak yang beraktivitas pada penyebaran informasi," jelasnya. Arif Suditomo, dihadapan Pasis Seskoad mengatakan bahwa TNI harus memahami tentang karakteristik media. "Bapak/Ibu pernah berhadapan dengan media, baik sebagai pemirsa TV, pembaca koran, atau pernah berhubungan langsung dengan media. Editorial media merupakan refleksi dari rakyat kita, masyarakat kita, komunitas kita. Itu adalah refleksi," katanya. Dia memastikan sikap media melalui informasi yang disajikan merupakan bentuk dari situasi di masyarakat. "Sikap media terbentuk karena ada refleksi di masyarakat." Dengan begitu, menurut Arif, harus dipahami juga tentang ritme media dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. "Pahami editorial media. Yang mendasari bagaimana sikap media terbentuk."

Tak hanya itu, peraih The British Chevening Awards 1999-2000 juga berpesan agar TNI memiliki hubungan yang baik dengan insan media. "Bapak dan Ibu bisa melakukannya di setiap titik. Ajak ngobrol, kasih tahu kami situasinya seperti apa. Kami wartawan cinta NKRI juga," pungkasnya.



KEMAMPUAN DETEKSI DINI PERSONEL INTELIJEN DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantyo, M.M.

Pendahuluan

Salah satu tugas Korem sebagai satuan Komando Kewilayahan yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah; dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Korem 143/Haluoleo sebagai satuan Komando Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki wilayah tanggung jawab meliputi 15 Kabupaten dan 2 Kota. Masyarakatnya, terbagi dalam wilayah binaan meliputi Kodim 1417/Kendari, Kodim 1412/Kolaka, Kodim 1413/Buton, Kodim 1416/Muna dan Kodim 1429/Buton Utara (Butur) serta satuan pemukul Yonif 725/Woroagi. Masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota memiliki tingkat ancaman dan kerawanan yang berbeda-beda tergantung kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakatnya. Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Konawe Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya seperti Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik.

Hal itu dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan terhadap Undang-Undang tersebut.

Pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang berujung bentrok fisik dan korban jiwa, perlu menggiatkan dan meningkatkan fungsi intelijen untuk mendeteksi dini di dalam lingkungan masyarakat. Koordinasi dengan dan/antar aparat keamanan sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar konflik tidak terjadi dan berdampak semakin meluas. Pencegahan konflik di tengah masyarakat khususnya konflik horizontal dapat dilakukan jika fungsi intelijen di lapangan mampu memberikan informasi aktual terkait situasi dan kondisi terkini di wilayahnya masing-masing. Luasnya wilayah menyebabkan pembahasan tulisan ini dibatasi pada personel Intelijen yang bertugas di wilayah daratan provinsi Sultra seperti Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara dan Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara dan Kab. Kolaka Timur, terutama yaitu Kota Kendari.

Aktifkan Sistem Peringatan Dini

Personel Intelijen yang terdapat di unit-unit Inteijen Kodim dan Tim Intelijen Korem dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung tugas pokok satuan atas dalam menjaga ketahanan wilayah agar tercipta suatu kondisi yang aman dan tenteram. Unit Intelijen Kodim dan Tim Intelijen Korem merupakan mata dan telinga Komandan Kodim (Dandim) dan Komandan Korem (Danrem) sehingga harus mampu menyajikan bahan-bahan keterangan yang diperlukan Komandan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kenyataan yang ada saat ini masih terdapat adanya permasalahan atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat dan muncul kepermukaan tanpa diketahui oleh personel Intelijen. Menghadapi fenomena seperti ini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan personel intelijen agar dari waktu ke waktu dapat melaksanakan tugasnya dalam deteksi dan cegah dini sehingga permasalahan tidak mencuat dan tugas pokok Korem dapat tercapai.

Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK). Sistem ini dibuat untuk mencegah konflik yang bisa terjadi di daerah dan nasional. Meskipun peluncuran sistem ini telah dibuka oleh Menko PMK, Desember 2021 lalu, namun dalam sosialisasi pelaksanaannya belum menjangkau hingga daerah. Pencegahan konflik melalui sistem ini berbentuk portal yang bisa menampilkan data konflik secara lengkap sehingga dapat membantu dalam pencegahan dan penanggulangan konflik. Tujuan dari peluncuran sistem ini yaitu Pertama, menyajikan data spasial kekerasan. Kedua, mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Ketiga, memantau kecenderungan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Keempat, menyediakan analisis cepat untuk penanggulangan kekerasan.

Untuk memperdalam analisis solusi kekerasan, pihak Kemenko PMK, akan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas yang ada di Indonesia, terutama dalam memberikan pemetaan konflik dalam penyajian data.

Sistem pemantauan yang telah dibuat Kemenko PMK ini perlu ditindaklanjuti hingga ke daerah lainnya di Indonesia sehingga portal dalam aplikasi sistem itu mampu memberikan peringatan dini terhadap situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Pengaktifan sistem pemantauan peringatan dini ini membutuhkan waktu dan sudah seharusnya terintegrasi dan terkoneksi pada semua daerah yang ada di Indonesia, sehingga mampu diaplikasikan dan disosialisasikan dari tingkat pusat hingga daerah.

Sistem pemantauan peringatan dini ini meliputi Pertama, deteksi dini dan cegah dini, yang dilakukan dengan membuat penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik; Kedua, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; Keempat, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan Kelima, penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tiga Hasil pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik di wilayah Sultra dikoordinasikan dengan Kesatuan Pengembangan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra dan Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Provinsi Sutra (Ditintelkam Polda Sultra) serta diintegrasikan dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di bawah pimpinan Kepala BIN Daerah Provinsi Sultra. Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat kewilayahan akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen.

Bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan potensi konflik sosial, yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak pemakai

untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijaksanaan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pemetaan Konflik di wilayah Sulawesi Tenggara Pemetaan potensi konflik sosial merupakan langkah awal mengetahui seberapa besar potensi kerawanan konflik sosial dengan faktor penyebab yang ada di wilayah ini. Peta ini merupakan sarana penting dalam perencanaan kegiatan deteksi dini dan mitigasi resiko konflik. Peta potensi konflik sosial merupakan bentuk visualisasi dari data yang didapat di lapangan dalam kegiatan deteksi dini yang telah melalui analisis mendalam, sehingga memudahkan dalam memahami kondisi sosial yang ada di wilayah. Pemetaan potensi konflik yang ada di wilayah dilaksanakan dengan pengambilan data di lapangan yang selalu dilakukan oleh Babinsa di wilayah tugasnya. Pelaksanaan kegiatan pengambilan data dilaksanakan melalui koordinasi baik dengan masyarakat setempat maupun aparat lainnya di wilayah.

Kegiatan deteksi dini sangat penting diakukan dalam upaya mitigasi resiko konflik sosial. Deteksi dini yang dilakukan membuat aparat pemerintah lebih siap dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Oleh karena itu, personel intelijen baik Tim Intelrem maupun unit Inteldim harus selalu berkoordinasi dengan para Babinsa di wilayahnya. Para Babinsa lah yang selama ini melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan memelihara data-data atau keterangan tentang geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada di wilayah guna mendukung pelaksanaan sistem pertahanan melalui Koramil sebagai fungsi utama Binter.

Salah satu tugas yang menjadi tanggung-jawab Babinsa adalah melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data geografi, demografi, kondisi sosial dan potensi nasional meliputi SDM, SDA/SDB serta sarana dan prasarana di wilayahnya. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendeteksi secara dini setiap potensi, gejala maupun peristiwa yang menjadi sumber ancaman di wilayah, sehingga dengan segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi agar

potensi dan permasalahan yang ada tidak berkembang dan bahkan dapat dicegah oleh aparat keamanan secara dini.

Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sultra, pemetaan konflik dapat diframing diantaranya, yaitu untuk Kab. Muna, Kab. Wakatobi dan Kab. Konawe Kepulauan (Konkep) selalu memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk Kab. Buton, Kab. Kolaka, Kota Bau-Bau dan Kota Kendari dalam pemetaan konflik sampai dengan saat ini masih sangat rentan terhadap berbagai kegiatan aksi unjur rasa (AUR), bahkan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sementara itu, untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pengolahan biji nikel, emas dan pengolahan batu masih akan terus dijadikan sebagai komoditas bagi aktivis untuk melakukan aksi unjur rasa (AUR) yang bisa berkembang menjadi potensi konflik yang akan terus diprotes masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar (illegal).

Upaya Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Personel Intelijen

Intelijen berperan melakukan upaya pendekstrian dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pendekstrian dini dan peringatan dini diperlukan guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, sehingga diperlukan intelijen negara yang tangguh dan profesional serta penguatan kerja sama dan koordinasi intelijen negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kemampuan intelijen dalam deteksi dini yang diharapkan diantaranya, yaitu Pertama, penguasaan intelijen dasar. Dengan penguasaan intelijen dasar desa/kelurahan binaannya, seorang personel intelijen dapat memahami karakteristik kerawanan desa/kelurahan binaannya.

Pemahaman ini diperoleh berdasarkan data-data Tri Gatra dan Panca Gatra, mencakup bidang-bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis, dengan memberikan arti pada

gejala-gejala, kejadian-kejadian yang menonjol dan perubahan-perubahan yang telah terjadi; Kedua, kemampuan penyelidikan. Penyelidikan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan dengan risiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu.

Penyelidikan intelijen terutama diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi aktual terutama terhadap bidang-bidang permasalahan dalam masyarakat desa/kelurahan binaannya yang berpotensi untuk berkembang menjadi potensi konflik sosial sesuai dengan karakteristik kerawanan yang menonjol sebagaimana telah diketahui dari intelijen dasar desa/kelurahan binaannya. Kemampuan penyelidikan intelijen bagi seorang personel intelijen terutama meliputi kemampuan penguasaan teknik dan taktik penyelidikan intelijen terbatas.

Adapun kemampuan teknik penyelidikan intelijen yang penting bagi seorang personel intelijen adalah penelitian, wawancara, wawancara tersamar atau *eliciting*, dan pengamatan/penggambaran. Kemampuan teknis intelijen tersebut pada umumnya diperoleh secara otodidak. Istilah intelijen terbatas, atau yang dalam diskusi kelompok sering disebut dengan intelijen terbuka hanya dipahami oleh sebagian anggota personel intelijen karena keterbatasannya dalam pendidikan dan pelatihan.

Personel Intelijen bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pengamanan tubuh dengan menyajikan intelijen bagi Pimpinan dalam rangka mendukung tugas pokok satuan. Salah satu fungsi utama dalam pembinaan fungsi intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam mencegah terjadinya konflik sosial masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kondisi personel dan peralatan yang masih kurang dan belum mencapai tahapan dalam menghadapi konflik sosial di tengah masyarakat.

Untuk dapat mengembangkan kemampuan deteksi dini personel intelijen sehingga mampu mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat maka upaya peningkatan kemampuan yang perlu dilakukan adalah **Pertama**, Melalui program Penajaman Pengetahuan Intelijen (PPI), Binkom pejabat intel dan Binpuan intel; **Kedua**, Pembekalan Intelter kepada Babinsa sebagai mitra personel Intelijen; **Ketiga**, Pembekalan dalam program Mobile Training Team (MTT) sebagai pengetahuan intel dasar; **Keempat**, Peningkatan Bimtek Intelijen Geospasial; **Kelima**, Program pembinaan peta jaring teritorial; **Keenam**, Penajaman kepekaan terhadap Bangsit dan melakukan tindakan proaktif kepada segala bentuk ancaman yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa; **Ketujuh**, peningkatan kemampuan dan pengetahuan Apintel dengan melaksanakan latihan program dan non program maupun pembekalan-pembekalan secara terukur; **Kedelapan**, meningkatkan kemampuan analisa berdasarkan fakta-fakta di lapangan agar mampu membuat prediksi secara akurat dan aktual sebagai pedoman pimpinan dalam pengambilan keputusan; **Kesembilan**, Apintel kewilayahannya diharapkan memiliki kemampuan menganalisa setiap ancaman, melaksanakan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi konflik/rawan konflik dengan diimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap ancaman global mampu diantisipasi dan dihadapi dengan maksimal sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupok satuan.

Penutup.

Demikian tulisan kemampuan deteksi dini personel intelijen dalam mencegah konflik sosial di wilayah Sulawesi Tenggara ini disusun. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan Aparat Intelijen lainnya dalam menjaga dan memelihara keamanan wilayahnya masing-masing.

Kolonel Inf Ir. Joko Tri Hadimantoyo, M.M. adalah Alumni Sepa PK 1994/1995, lulusan IPB Bogor, jabatan sebelumnya Kasi Intel Kasrem 143/HO saat ini menjabat sebagai Pamen Ahli Bidang OMP Sahli Pangdam IV/Diponegoro.



PEMBINAAN TERITORIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GUNA MENDUKUNG KESATUAN BANGSA

Letkol Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana, terutama karena letak wilayah negara Indonesia yang berada pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik utama dunia serta kondisi alamnya yang terdiri dari hutan, gunung-gunung terutama gunung berapi, aliran sungai dan rawa-rawa. Bencana alam yang akan terjadi pada dasarnya sulit diprediksi, walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju secara pesat, namun belum mampu memprediksi dan memperkirakan kapan, di mana dan jenis bencana alam apa yang akan terjadi. Akibat kondisi tersebut maka setiap terjadinya bencana alam selalu menimbulkan korban jiwa, harta benda serta kerusakan daerah. Selain itu letak Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan gerakan-gerakan tanah pada tempat-tempat yang secara geologis memang labil menjadi lebih berpotensi terjadinya longsor. Keadaan ini diperparah lagi dengan maraknya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya serta banyaknya pembabatan hutan yang dilakukan secara ilegal, tanpa mengindahkan kesimbangan lingkungan.

Maka lengkaplah Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana alam, baik gempa tektonik, tsunami, letusan vulkanik gunung berapi, banjir dan tanah longsor maupun kebakaran hutan. Posisi geografis dan struktur geologis Indonesia yang demikian itu, sangat diketahui oleh pemerintah dan para ahli geologi di negeri ini, namun masalah mendasar yang kita hadapi adalah belum adanya program jangka panjang dalam rangka upaya penanganan bencana alam secara dini. Kalaupun ada, belum menunjukkan grafik signifikan, belum ada teknologi yang lebih maju dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Sehingga kasus-kasus bencana alam yang terjadi saat ini tidak bisa ditangani secara optimal. Jumlah korban jiwa cukup tinggi, begitupun kerugian material sangat besar, seperti pada kasus bencana tsunami, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, membuktikan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana, sikap perilaku antisipasi dan upaya penanggulangan bencana alam tersebut.

Penanggulangan Bencana Alam Bagian dari OMSP

Penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia, sesuai UU RI No. 24 Tahun 2007

Dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sedangkan penanggulangan bencana di tingkat propinsi/kabupaten/kota, diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diketuai oleh gubernur/bupati/walikota. Hingga saat ini BNPB dan BPBD masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tanggap darurat sesaat setelah bencana alam terjadi, dimana masyarakat korban bencana sangat membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat.

Disamping itu, untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil, maka diperlukan sebuah perencanaan program tanggap darurat yang lebih terpadu dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam yang terjadi. Termasuk bagaimana TNI AD melalui Komando Kewilayahan dapat merancang program tanggap darurat dengan memaksimalkan pembinaan teritorial (Binter) di setiap Komando Kewilayahan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari program misi kemanusiaan yang merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Data kekuatan satuan Komando Kewilayahan saat ini terdiri dari 15 Kodam, 45 Korem, 333 Kodim, dan 3.330 Koramil. Aktualisasi OMSP TNI AD saat ini nampaknya bukan lagi menjadi suatu program, akan tetapi telah menjadi tuntutan utama yang harus dioptimalkan melalui Binter di setiap Komando Kewilayahan TNI AD. Hal tersebut di atas didasarkan beberapa argumentasi yang sangat mendasar antara lain:

Pertama, Secara legal formal payung hukum pelibatan TNI khususnya TNI AD dalam penanggulangan alam merupakan amanat dari UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu amanat dari UU tersebut yang harus dilaksanakan, di mana tugas pokok TNI memiliki dua dimensi yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Mencermati dinamika dan

tantangan tugas TNI, tugas dalam konteks Operasi Militer Perang dapat dikatakan ancamannya semakin berkurang sejalan makin kecilnya konflik di wilayah perbatasan maupun di wilayah luar kepulauan Indonesia. Meskipun masih ada konflik yang terjadi, namun sejauh ini masih bisa diatasi dan tidak bereskalasi tinggi yang akan mengganggu keutuhan NKRI.

Kedua, Pengalihan fokus perencanaan tugas pokok terhadap OMSP untuk menanggulangi bencana alam memang mendesak untuk diperhatikan, karena kecenderungan ancaman bencana alam akhir-akhir ini terus meningkat, dan tidak dapat diprediksi kapan dan dimana bencana alam tersebut akan terjadi. Dengan demikian kondisi rawan bencana alam ini membutuhkan program tanggap darurat secara dini, terpadu dan berkelanjutan. OMSP dalam penggulangan bencana alam bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan penyelamatan warga masyarakat, karena pelibatan TNI AD dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keharusan yang sangat obyektif.

Ketiga, Masih terbatasnya kemampuan dan sumber daya nasional dalam penanggulangan bencana alam. Sementara pelibatan TNI AD selama ini dalam penanggulangan bencana alam sifatnya hanya membantu dan dilaksanakan secara spontan belum terstruktur. Kendati demikian, pada kenyataannya aksi dan tindakan tanggap darurat terhadap bencana alam yang dilakukan TNI AD sangat signifikan, di mana dalam setiap terjadi peristiwa bencana alam, TNI AD acap kali menjadi pihak pertama yang langsung terjun melakukan tindakan pertolongan pertama dan mengevakuasi.

Keempat, Masyarakat masih banyak yang tidak faham bahwa operasi tanggap darurat penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari OMSP, sehingga bila operasi tanggap darurat terhadap bencana ini benar-benar dapat diprogramkan sebagai bagian dari OMSP, maka akan berdampak positif bagi peningkatan citra TNI AD karena memiliki konsen dan empati terhadap keselamatan masyarakat.

Kelima, Negara maju manapun di dunia, militer menjadi kekuatan utama untuk melaksanakan OMSP. Mereka bahkan memiliki satuan khusus yang terlatih untuk melakukan tanggap darurat mengatasi musibah bencana alam, lengkap dengan sarana pendukung serta didukung dengan anggaran besar.

Maka tidak ada alasan bagi TNI AD untuk mengabaikan keterlibatannya dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari OMSP. Jika selama ini TNI AD telah terlibat dalam penanggulangan bencana alam, maka titik tekannya sekarang adalah bagaimana peran TNI AD dalam penanggulangan bencana alam dapat lebih dioptimalkan, melalui program Binter di Komando Kewilayahannya dapat dimasukkan sebagai Renstra TNI AD.

Pembinaan Teritorial (Binter) dalam Bentuk Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya. Kesiapsiagaan sebagai tindakan yang diambil sebelum kondisi darurat untuk mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi respon yang efektif jika keadaan darurat terjadi, mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan, pelatihan, simulasi, dan tindakan prabencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektivitas respon masyarakat selama bencana.

Kesiapsiagaan mencakup kegiatan-kegiatan seperti merumuskan, menguji, dan melakukan latihan terhadap rencana bencana, memberikan pelatihan bagi responden bencana dan masyarakat umum, melakukan komunikasi dengan publik dan orang lain tentang kerentanan bencana, serta tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi hal tersebut. Bila dikaitkan dengan hal tersebut maka kesiapsiagaan binter dalam rangka menghadapi bencana alam adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan merumuskan serta pembinaan terhadap organisasi, personel, materil, pangkalan, pembinaan

latihan serta perangkat lunak dalam rangka penanggulangan bencana alam. Melalui Binter di setiap Komando Kewilayahannya yang ada diseluruh Indnesia, maka peran TNI AD dalam rangka penanggulangan bencana alam akan lebih optimal dapat dikelompokan dalam tiga tahap kegiatan yaitu:

Pertama. Kegiatan Pra-Bencana. Kegiatan ini lebih banyak bertumpu kepada kegiatan Binter Komando Kewilayahannya dengan titik berat kegiatan kepada upaya mengurangi resiko bencana, melalui pembangunan fisik maupun kegiatan pembinaan teritorial seperti penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancamana bencana. Adapun kegiatan Binter pada tahap pra-bencana meliputi: a. Pencegahan, merupakan upaya penyebarluasan berbagai peraturan, perundang-undangan yang berdampak untuk mengurangi resiko bencana termasuk pembuatan peta rawan bencana. b. Mitigasi (penjinakan), yaitu upaya secara secara fisik mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti pembuatan cekdam, rehabilitasi aliran sungai, pegawasan terhadap RUTR, IMB serta pemindahan penduduk ke daerah yang aman bencana. dan c. kesiapsiagaan dalam bentuk pelatihan dan gladi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat pemerintah, aparat teritorial, termasuk penjagaan posko penanggulangan banjir dan pos-pos siaga lain yang sejenis. Kegiatan pada tahap ini amat penting karena usaha untuk menghindari bencana akan lebih efektif dan efisien daripada tindakan rehabilitasi dan kontruksi.

Kedua. Kegiatan Tanggap Darurat. Pada tanggap darurat, Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI (PRC PB TNI) dibantu Satpur/Banpur dan Kowil sesegera mungkin dikirimkan ke lokasi untuk menangani berbagai dampak yang timbul akibat bencana. Kegiatan tersebut antara lain meliputi: a. mencari dan menyelamatkan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan. b. Melaksanakan evakuasi korban dan pengurusan pengungsisc. Mendirikan posko terpadu, dapur lapangan, dan membantu aparat Polri dalam mengamankan daerah yang

terkena bencana, jangan ada oknum yang memanfaakan situasi dengan menjarah barang-barang milik masyarakat korban bencana. d. Mengefektifkan BPBD dalam kegiatan dan distribusi bantuan serta memberikan informasi bantuan yang dapat diterima oleh korban bencana e. Memberdayakan semua potensi yang ada untuk membantu menangani keadaan dalam satu kendali yang meliputi aparat pemerintah (TNI, Polri dan Pemda), Ormas dan relawan, baik dalam maupun luar negeri. f. Melaporkan secara terus-menerus tentang perkembangan kepada satuan atas.

Ketiga. Kegiatan Pasca Bencana. Pada masa ini peran Kowil lebih diutamakan karena PRC PB TNI termasuk Satpur/Banpur segera ditarik ke satuan masing-masing. Segera setelah bencana atau dalam pasca bencana kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada tingkat yang memadai serta mengkonsolidasikan berbagai sarana prasarana ekonomi, transportasi dan kehidupan masyarakat secara darurat guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana.
- b. Rekontruksi, yaitu membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana secara lebih dengan tekad mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di waktu yang akan datang. Kegiatan pada tahap rekontruksi hendaknya diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan yang mengacu pada prosedur administrasi dan manajemen pembangunan.



Kesiapsiagaan Bencana Untuk Menjaga Kesatuan Bangsa

Kita menyadari dengan berbagai keterbatasan alutsista, sarana pendukung, minimnya kemampuan sumber daya prajurit dan terbatasnya anggaran pertahanan seperti dalam tugas OMSP, khususnya dalam penanggulangan bencana alam belum bisa optimal dilakukan TNI AD. Akan tetapi suatu keharusan bila kita menginginkan peran TNI AD dalam penanggulangan bencana alam dapat lebih optimal seperti biasa dilakukan oleh negara-negara maju melalui pembinaan teritorial kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, maka dalam setiap Komando Kewilayahann TNI AD harus melakukan program Binter dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dimasukkan ke dalam program kerja atau bahkan Renstra TNI AD.

Ini mungkin sebuah konsekuensi yang harus diterobos TNI AD agar tugas penanggulangan bencana bisa lebih optimal dilakukan. Atau kita akan selalu terlambat menanggulangi dampak bencana alam, dan membuat masyarakat korban bencana menderita berkepanjangan akibat musibah bencana alam. Hal ini tentunya tidak kita inginkan terus terjadi.



Penutup.

Dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di Indonesia, program Binter TNI AD dalam mempersiapkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana (OMSP) menjadi semakin nyata. Selain itu sebagaimana tertera dalam buku putih Pertahanan Negara, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak ancaman non tradisional dan salah satunya adalah bencana. Oleh karena kebijakan strategi pertahanan dalam program Binter kesiapsiagaan bencana mendesak untuk dilaksanakan. Norma penggunaan kekuatan militer untuk bantuan kemanusiaan dalam konteks penanggulangan bencana, mencakup penggunaan atas kapasitas militer yang tak terguna (*idle capacity*), sehingga hal tersebut tidak akan mengurangi kemampuan TNI AD dalam menjalankan tugas pokoknya. Dengan demikian, tugas pertambuan tersebut bukanlah merupakan tugas yang permanen dan akan kembali kepada tugas kemiliterannya setelah misi kemanusiaan selesai.

Melalui Binter dalam bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, maka akan terbentuk suatu sinergitas antara TNI AD dengan masyarakat merasa senasib dalam tinggal di suatu negara seperti Indonesia yang pada kenyataannya adalah wilayah yang rawan bencana alam. Dengan demikian maka terbentuk persamaan tugas dan kewajiban dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah dalam hal ini TNI AD apabila dapat melaksanakan Binter kesiapsigaan penanggulangan bencana akan dapat menciptakan suatu pemahaman bahwa masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah/TNI AD dalam bentuk kepedulian terhadap penanggulangan bencana.



Dengan demikian apabila Binter kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap NKRI. Apabila hal tersebut di atas dapat dilaksanakan maka salah satu tugas pokok TNI AD yaitu menjaga kedaulatan wilayah darat NKRI dapat terwujud. Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana, sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi bencana. Untuk itu, misi Binter TNI AD dalam penanggulangan bencana adalah menuju Indonsia tangguh. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitasnya yang tinggi dalam menghadapi bencana. Ketahanan dalam menghadapi bencana adalah sebagai kapasitas suatu sistem. Dengan demikian apabila Binter kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap NKRI.

Apabila hal tersebut di atas dapat dilaksanakan maka salah satu tugas pokok TNI AD yaitu menjaga kedaulatan wilayah darat NKRI dapat terwujud. Menyadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana, sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi bencana. Untuk itu, misi Binter TNI AD dalam penanggulangan bencana adalah menuju Indonsia tangguh. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitasnya yang tinggi dalam menghadapi bencana. Ketahanan dalam menghadapi bencana adalah sebagai kapasitas suatu sistem, komunitas atau masyarakat dalam menghadapi ancaman. Melalui program nyata binter kesiapsiagaan penanggulangan bencana akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Letnan Kolonel Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc. adalah Abituren Pendidikan Regular LX SESKOAD TA 2021, sekarang menjabat di Dandenharjasaint I-44-12



PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA SWISS

Kompol James I.S. Rajagukguk, S.I.K.

PENDAHULUAN

Sistem pertahanan menjadi hal mutlak bagi sebuah negara dalam kehidupan global. Indonesia menerapkan pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Guna menghadapi ancaman militer, Indonesia menggerakkan komponen utama (TNI) yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan (Komcad) merupakan seluruh sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana. Sumber daya nasional dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan keamanan negara. Seperti halnya Indonesia, Swiss juga menerapkan sistem pertahanan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan negara. Swiss yang identik dengan pegunungan salju, cokelat kelas mewah, produk jam tangan dan pisau serbaguna *Swiss Army* menggambarkan suatu negara yang damai, aman dan sejahtera. Apresiasi PBB kepada Swiss pada 2017, berdasarkan Indeks Kebahagiaan Dunia bahwa Swiss berada di peringkat keempat dunia karena mampu mendukung kebahagiaan, kebebasan, kepedulian, kemurahan hati, kejujuran, kesehatan, pendapatan, dan pemerintahan yang bersih.

Kondisi ini didukung sistem politik luar negeri netral/non blok (Kongres Wina 1815) yang mampu mewujudkan hubungan baik dengan semua negara di dunia. Sejarah Swiss terakhir kali terlibat konflik dengan negara asing ialah sebelum tahun 1815. Setelah merdeka dari Prancis, Swiss tidak mau lagi dijajah dan mempersiapkan rakyatnya dengan pelatihan militer guna membangun sistem pertahanan yang kuat. Hingga sejarah mencatat, saat Nazi Jerman berhasil menguasai banyak negara pada Perang Dunia II, cuma Swiss satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Jerman namun tidak disentuh oleh pasukan Nazi. Status Swiss sebagai negara netral bukan menjadi negara yang lemah. Sistem pertahanan Swiss justru kuat karena hampir seluruh penduduk Swiss berkemampuan militer dengan adanya wajib militer. Fenomena sistem pertahanan negara Swiss yang kecil namun sangat kuat dengan pemberdayaan sumber daya nasionalnya baik SDM, SDA dan SDB sebagai komponen cadangan sangat menarik untuk dianalisis. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ; 1) Bagaimana sejarah singkat angkatan bersenjata terkait dengan komponen cadangan di negara

Swiss ?; 2) Bagaimana sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Swiss ?; 3) Bagaimanakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Swiss dihadapkan dengan ancaman dari luar negeri ?; 4) Bagaimanakah pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Swiss ?; dan 5) Apakah saran masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan di Indonesia ?.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penting kiranya untuk menganalisis sistem pertahanan negara Swiss terkait manajemen komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara. Analisis sistem pertahanan negara Swiss menggunakan metode analisis diskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Pembahasan terkait manajemen komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara di Swiss memiliki nilai guna untuk memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait sistem pertahanan negara Swiss. Adapun maksud dari tulisan ini adalah untuk mengetahui manajemen komponen cadangan di Swiss. Sedangkan tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah militer Swiss serta manajemen komponen cadangan terkait sistem rekrutmen, pola dan penggunaan komponen cadangan dalam membangun pertahanan negara. Adapun ruang lingkup tulisan ini terbatas pada sistem manajemen komponen cadangan negara Swiss.

Pembahasan

Salah satu tugas negara adalah memaksimalkan kekuatan profesional militer untuk menjaga kepentingan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sistem pemerintahan negara membutuhkan hubungan sipil-militer yang erat, Diteorikan oleh Peter Feaver bahwa pemerintahan sebagai bentuk kontrol sipil (obyektif dan subyektif) atas militer melalui kebijakan (policy) sebagai produk elit sipil, yang dilaksanakan oleh elit militer. Kuatnya hubungan sipil-militer dalam mengelola pertahanan negara sangat terlihat di Swiss.

Sistem pertahanan Swiss tidak terlepas dari latar belakang sejarah negara. Swiss sebagai negara kecil, memiliki sejarah konflik dengan negara tetangganya Liechtenstein yaitu negara kecil dengan luas hanya 160 km persegi dan penduduk hanya 37.000 jiwa. Swiss mengalami konflik dengan Liechtenstein sebanyak 3 kali yaitu pertama, pada 5 Desember 1985, karena adanya kesalahan tembak saat latihan oleh Angkatan Darat Swiss; Kedua, pada 13 Oktober 1992, karena kadet Angkatan Darat Swiss mendirikan pos pengintaian di Treisenberg (wilayah Liechtenstein); dan ketiga, pada 1 Maret 2007, karena pasukan Angkatan Darat Swiss masuk 1,6 kilometer ke dalam wilayah Liechtenstein. Kasus ini sempat menimbulkan ketegangan diplomatik hingga Swiss harus membayar ganti rugi. Swiss juga memiliki sejarah peperangan, yaitu perang saudara Katolik vs Protestan (*First War of Villmergen 1656* dan *Toggenburg War/Second War of Villmergen 1712*). Swiss pernah diinvansi oleh Napoleon, pengeboman oleh USA dan Sekutu pada masa PD II. Akibat serangan tersebut Inggris dan USA mendapat sanksi internasional dan wajib membayar ganti rugi kepada Swiss. Terakhir kali Swiss mengalami pertempuran militer tahun 1516 melawan Prancis (Swiss kalah).

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut Swiss menerapkan sistem pertahanan total melalui wajib militer bagi warga negara (laki-laki). Konsep They are good marksman ini efektif menghemat anggaran negara dimasa damai. Swiss hanya menggaji 160.000 personel militer tetap, namun pada saat negara membutuhkan dapat memanggil hingga 1.510.259 rakyatnya yang siap perang. Efektivitas pasukan Swiss terbukti menangkal invasi negaranya selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Pengalaman sejarah Swiss diinviasi asing menjadi motivasi tersendiri dalam membangun pertahanan negara. Kondisi Swiss sebagai negara kecil dengan luas wilayah dan populasi penduduk yang kecil serta tingkat kelahiran yang rendah, mendorong Swiss harus membangun kekuatan pertahanan negaranya serta memperkuat diplomasi politik luar negeri untuk menghindari penggunaan kekuatan militer.

Perkembangan kekuatan sistem pertahanan Swiss sesuai data Global Fire Power tahun 2021, kekuatan Swiss berada diperingkat 30 dari 140 negara di dunia dengan Power Indek Score 0,5011 (*a score of 0.0000 is considered perfect*). Kekuatan pertahanan Swiss dideskripsikan pada tabel berikut:



Tabel 1. Kemampuan Pertahanan
Sumber ; Global Fire Power 2021

Berdasarkan data, kekuatan pertahanan Swiss dalam kategori baik/good. Sedangkan ditinjau dari dukungan geografi pada peringkat 55/140 dunia, dukungan anggaran peringkat 39/140 dunia, dan dukungan logistik peringkat 20/140 dunia. Sedangkan dukungan SDM peringkat 71/140 dunia. Hal ini didukung adanya kekuatan semi-militer yang terstruktur dan terorganisasi dengan kemampuan serupa militer profesional.⁹ Dengan data dan fakta tersebut dapat diambil benang merah sistem pertahanan Swiss yaitu ; 1) Sikap politik luar negeri Swiss yang netral mampu membawa keamanan dan kedamaian; dan 2) Kesadaran bela negara /patrotisme dari seluruh rakyat menjadi kekuatan utama negara Swiss meskipun memiliki berbagai keterbatasan pada sektor geografi maupun demografi.

Guna mendukung keberlangsungan sistem pertahanan negara maka Swiss mengelola komponen cadangan terkait sistem rekrutmen komponen cadangan, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan, serta pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan. Sumber daya nasional berupa SDM, SDA, SDB dan Sarpras sebagai komponen cadangan dikelola dengan baik oleh Swiss.

Kekuatan SDM sebagai komcad, dikelola Swiss melalui wajib militer dengan sistem rekrutmen sebagai berikut ; 1) Aturan wajib militer diputuskan melalui referendum yang sudah digelar 3 kalinya pada 2013 dengan hasil rakyat tetap memilih melanjutkan wajib militer; 2) Wajib militer bagi seluruh pria usia 18-34 tahun dengan persyaratan sehat fisik, intelektual, dan mental yang baik. Warga negara yang direkrut diberi posisi berbeda sesuai dengan kebugaran fisik, kemampuan intelektual, dan bakat mereka; 3) Perempuan tidak wajib militer namun boleh mendaftar secara sukarela. Guna memenuhi kebutuhan 18.000 tentara baru setiap tahunnya, Swiss membuat *annual army information day mandatory* agar keikutsertaan perempuan bertambah hingga pada tahun 2017 naik 35% di banding tahun sebelumnya. 4) Rekrutmen khusus bagi usia 16 tahun yang tertarik mengikuti kursus persiapan agar mendapat prasyarat ke berbagai sektor militer; dan 5) Rekrutmen dilaksanakan tersebar di enam pusat rekrutmen (Windisch, Lausanne, Sumiswald, Monte Ceneri, Rüti, Mels).

Bagi rakyat yang tidak melaksanakan wajib militer dikenakan aturan yaitu : 1) orang bermasalah kesehatan harus membayar pajak tambahan 3% per tahun sampai usia 37 tahun, kecuali terkena a disabilitas; dan 2) orang bermasalah mental dapat memilih dinas pelayanan sipil seperti bakti sosial, rekonstruksi situs budaya, membantu lansia dan kegiatan non militer lainnya. Layanan sipil selama 340 hari /50% lebih lama dari layanan militer. Warga Swiss yang tinggal di luar negeri tidak ikut Wamil pada masa damai dan warga dengan kewarganegaraan ganda harus ikut wajib militer.

Komponen cadangan melalui wajib militer diorganisasir dan kewenangan penggunaannya dibawah parlemen Swiss dan setelah selesai menjalani wajib militer kembali menjadi masyarakat biasa. Bagi warga negara yang berminat melanjutkan karier di militer dapat mengikuti rekrutmen untuk meniti karier militer lebih tinggi dengan mengikuti pelatihan lebih lanjut yaitu : 1) Tingkat Kopral, ditugaskan secara eksklusif untuk spesialis, membutuhkan 5 minggu; 2) Tingkat Sersan membutuhkan 14

minggu instruksi khusus peringkat, 6 minggu pelatihan praktis dan 8 minggu layanan praktis; 3) Tingkat Sersan Mayor membutuhkan 14 minggu instruksi khusus peringkat dan 15 minggu layanan praktis; 4) Tingkat letnan membutuhkan 30 minggu instruksi khusus peringkat dan 4 minggu pelatihan praktis; dan 5) Usia masa dinas militer berbeda-beda menurut pangkatnya mulai dari 34 tahun tamtama, NCO dan staf hingga 50 tahun, dan profesional pensiun usia 58 dan 65 tahun.

Pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan juga dilakukan secara tertib di Swiss. Pembinaan kemampuan komponen cadangan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut ; 1) Semua wajib militer dipanggil untuk diberikan presentasi tentang militer, perlindungan sipil, kebijakan keamanan, hak dan tugas serta administrasi militer; 2) Peserta wajib militer diberikan bukti telah memenuhi kewajiban militer; 3) Masa kamp pelatihan militer berlangsung selama 18 sampai 21 minggu. Fase pertama selama 7 minggu, mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran dan bagi yang memenuhi syarat diberi kesempatan melanjutkan ke sekolah kadet. Fase kedua, selama 6 minggu dikhkususkan untuk instruksi dasar fungsi khusus untuk mempelajari keterampilan khusus militer. Pada fase ketiga, dilatih instruksi dalam formasi yaitu kelompok pertempuran dan batalion militer.

Pembinaan dan pemeliharaan komponen cadangan dilakukan selama mengikuti tugas wajib militer. Aturannya adalah selama bertugas militer cadangan, peralatan pribadi harus disimpan di rumah termasuk senjata dan munisinya. Bagi anggota yang tidak mau membawa senjata harus mengajukan permohonan dinas tanpa senjata. Setelah mengakhiri status tugas militer maka senjata dapat dibeli secara pribadi dengan harga murah. Guna pembinaan dan pemeliharaan kemampuan diwajibkan latihan menembak minimal setahun sekali. Latihan menembak tidak hanya personil militer namun acara populer bagi warga Swiss dan terbuka bebas untuk siapa saja.

Hal ini sesuai budaya penggunaan senjata di Swiss secara kultural hanya untuk kepentingan rekreasi termasuk olahraga menembak dan bela negara jika dibutuhkan oleh negara. Menembak merupakan olah raga bagi laki-laki Swiss yang disiapkan sarana khusus oleh negara. Bahkan turnamen menembak telah ada sejak 1600 silam setiap September. Turnamen bagi warga usia 13-17 tahun baik laki maupun perempuan dan pemenangnya menerima gelar Schutzenkongig (Raja/Ratu Penembak Jitu).



Penerima gelar Schutzenkongig tahun 2022
Jörg Bäumer dan Seine Ehefrau Regina

Kepemilikan senjata menjadi budaya Swiss sebagai wujud patriotik untuk mempertahankan tanah air. Penjual senjata merapkan aturan ketat dibawah Otoritas Swiss untuk memutuskan apakah seseorang layak atau tidak dengan pertimbangan kepolisian, psikiater, serta otoritas kota/canton untuk mengetahui latar belakang kondisi kejiwaan pemegang senjata. Hal ini didukung hukum Swiss yang tegas untuk mencegah kekerasan bersenjata, bahwa warga yang pernah melakukan kejahatan atau tertangkap pengaruh alkohol tidak diizinkan memiliki senjata.

Pemeliharaan Komcad diwujudkan dengan kompensasi yang diberikan selama wajib militer dasar sebesar 4 Franc Swiss perhari dan 30 Franc Swiss untuk letnan jenderal. Selain itu juga ada kompensasi tambahan mulai dari 23 hingga 80 Franc Swiss untuk perwira yang sedang menjalani pelatihan. Kompensasi ini dibiayai dari kontribusi sosial yang dipungut dari gaji. Bagi seorang karyawan tetap menerima gaji penuh selama dinas militer dari



majikannya dan majikan tidak dapat memecat karyawannya yang menjalani dinas militer. Kompensasi bagi pelajar, independen atau pengangguran tetap menerima kompensasi dengan jumlah variatif jika memiliki anak/keluarga.

Pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana di Swiss didesain mendukung pertahanan negara. Swiss memiliki banyak bunker militer yang terkamuflase dengan alam, rumah penduduk, maupun sarana publik lainnya. Gua-gua di Pegunungan Alpen dikembangkan sebagai bunker militer, hingga rumah yang menyamarkan sebuah tank. Swiss memiliki sekitar 300.000 bunker militer dan 5.100 tempat penampungan umum penduduk (jika diperlukan). Hampir semua rumah di Swiss dibangun dengan perlindungan nuklir. Swiss memanfaatkan kondisi geografi sebagai benteng strategis. Perbatasan Swiss didesain bisa diledakkan sewaktu-waktu yang tercatat 3.000 titik penghancuran baik di jembatan, jalan, rel kereta, hingga terowongan yang bisa menampung satu divisi pasukan di gunung.

Berdasarkan data dan fakta diatas, dapat dilakukan analisis SWOT terkait pengelolaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Swiss dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan dari faktor internal serta faktor eksternal Swiss yang mencakup peluang dan hambatan. Analisis pertahanan Swiss dengan metode

SWOT dideskripsikan pada tabel 2 berikut :

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal		
Peluang (Opportunity)	1. Pemerintahan Kuat 2. Stabilitas Politik	Strategi SO Memaksimalkan dukungan rakyat dalam membangun Sistem Pertahanan Swiss
Ancaman (Threat)	1. Pengaruh Global 2. Kebebasan Senjata	Strategi ST Memperkuat sistem hukum negara Swiss
		Strategi WO Memanfaatkan dukungan ekonomi dalam membangun Sistem Pertahanan Swiss
		Strategi WT Meningkatkan kekuatan diplomasi politik luar negeri

Berdasarkan analisis SWOT diatas dapat diambil alternatif strategi dalam membangun sistem pertahanan Swiss yaitu : 1) Strategi SO dilakukan dengan memaksimalkan dukungan rakyat (patriotisme) dalam membangun Sistem Pertahanan Swiss; 2) Strategi WO dilakukan dengan memanfaatkan dukungan Ekonomi dalam membangun sistem

pertahanan Swiss; 3) Strategi ST dilakukan dengan memperkuat sistem hukum negara Swiss; dan 4) Strategi WT dilakukan dengan meningkatkan kekuatan diplomasi politik luar negeri. Berdasarkan hasil analisis sistem pengelolaan komponen cadangan di Swiss, maka dapat diambil pelajaran bagi Indonesia, khususnya TNI terkait dengan komponen cadangan di Indonesia.

Sumber daya manusia Indonesia yang lebih besar dari Swiss dapat lebih ditingkatkan pengelolaannya guna mendukung pertahanan negara. Peningkatan rasa nasionalisme dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang besar harus dikelola untuk kesejahteraan dengan mempertimbangkan segi keamanan bagi negara. Sumber daya buatan dan sarana prasarana harus dibangun dan dikembangkan tidak hanya untuk kemajuan bangsa namun juga mempertimbangkan faktor pertahanan bangsa.

Guna menunjang pencapaian sasaran tersebut dibutuhkan pemerintahan Indonesia yang kuat dengan dukungan politik dan hukum yang kuat sehingga terbentuk clean government yang mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Menjadi catatan penting bahwa Swiss mampu memanfaatkan sumber daya nasional baik SDM, SDA, SDB serta Sarpras sebagai pendukung sistem pertahanan negara.

Hal ini sesuai dengan pendapat Samuel P. Huntington bahwa kontrol sipil (civilian control) merupakan kekuatan relatif sipil terhadap militer. Sejalan dengan pendapat Peter D. Feaver (2003); Armed Servants, Agency theory tentang relasi sipil–militer sebagai kendali sipil terhadap militer (*the civilian control of the military*) yang dapat mewujudkan Keamanan Nasional.

Agency Theory, menekankan hubungan principal (pemberi tugas) dengan agent (penerima tugas) atau kontrol sipil atas militer karena asimetri institusional (fungsi pemerintahan). Berdasarkan fakta dan teori tersebut sistem pertahanan negara dimaknai sebagai kekuatan bersama (sipil-militer) yang diterapkan negara guna integritas wilayah dan perlindungan rakyatnya.

Penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah untuk kemakmuran rakyatnya.

Penutup

Pengelolaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan di Swiss menunjukkan betapa kuatnya hubungan negara dengan rakyatnya. Kekuatan dan keseriusan pemerintah Swiss yang didukung penuh oleh rakyat terbukti mampu mewujudkan negara Swiss sebagai negara yang damai, aman dan makmur. Kondisi ini diakui secara internasional bahwa Swiss sebagai negara kecil namun dapat menjadi salah satu negara kaya didunia dengan sistem perbankan internasional. Swiss mampu menjadi negara yang aman dan damai tanpa ada konflik yang serius dengan politik luar negeri yang netral dan berhubungan baik dengan dunia internasional diberbagai bidang.

Keterbatasan kondisi geografi dan demografi negara Swiss mampu dirubah menjadi peluang yang dikelola dengan kemampuan ekonomi menjadi potensi kekuatan nasional yang dapat menunjang kesejahteraan dan keamanan negara. Kunci dari keberhasilan Swiss adalah keseriusan pemerintahan dengan aturan hukum yang kuat dan tegas sehingga mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Swiss. *Lesson learned* dari analisa komponen cadangan dalam sistem pertahanan di Swiss adalah kemampuan mengelola keterbatasan sumber daya nasional secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan nasional. Sinerginya kekuatan Sipil (pemerintahan dan rakyat) dalam pemerintahan Swiss yang berpengaruh pada pertahanan negara (militer-sipil) dan kesejahteraan rakyatnya (ekonomi). Hubungan harmonis pemerintah dengan rakyat Swiss (semangat patriotisme) menjadi kekuatan dalam mengelola kebijakan pertahanan negara dalam memanfaatkan sumber daya nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

**Kompol James I.S. Rajagukguk, S.I.K.
adalah Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**



PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM PERSPEKTIF ANGKATAN BERSENJATA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Major Cba Ahmad Maulana, S.E.

PENDAHULUAN

Brunei Darussalam merupakan negara terkaya ketiga di dunia. Negara ini sering kali dijuluki sebagai Negara Petrodollar karena pendapatan utamanya bersumber dari pertambangan minyak bumi serta gas alam. Brunei, merupakan salah satu negara kecil berdaulat yang terletak di utara Pulau Kalimantan dan memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km². Berbatasan dan dipisahkan oleh Malaysia. Wilayah Brunei terbagi atas dua bagian dengan 97 persen penduduknya berada di wilayah bagian Barat yang lebih besar. Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) diresmikan pada 31 Mei 1961.

Pada awalnya dikenal dengan nama Askar Melayu Brunei sebelum dianugerahkan gelaran "Diraja" pada 31 Mei, 1965, seiring berjalannya waktu dikenal dengan sebutan Askar Melayu Diraja Brunei. Namun setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 1 Januari 1984, pada akhirnya nama Askar Melayu Diraja Brunei kemudian dirubah kembali menjadi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Dalam sejarahnya, personel Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dipersyarikatkan berasal dari warganegara Brunei yang berbangsa Melayu (Bumiputera) yang boleh memasuki kedinasan di ketentaraan.

Etnik-etnik Melayu terdiri dari suku kaum asli Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong sebagaimana didefinisikan di dalam konstitusi Brunei. Dinas militer tidak wajib pada populasi tertentu dan tidak ada Angkatan Bersenjata Pemerintah Brunei (Melayu: Angkatan Bersenjata Diraja Brunei) adalah nama angkatan bersenjata Brunei Darussalam yang dibentuk pada 31 Mei 1961.

Kondisi sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Brunei Darussalam memiliki kebijakan dan strategi yang berbeda dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam hal membangun kekuatan angkatan bersenjata dengan mengedepankan etnis-etnis yang menjadi penduduk asli sebagai personel yang dapat masuk aktif dinas di kemiliteran. Terlepas dari kebijakan pemerintah Brunei Darussalam tersebut, cukup menarik untuk mengupas kondisi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dari sudut pandang komponen cadangan, mengingat dengan segala potensi nasionalnya baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya Brunei Darussalam mampu membangun dan mengembangkan angkatan keempat yang siap di mobilisasi.

Mengalir dari latar belakang diatas, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok persoalan yaitu : Pertama, sejarah singkat angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan?. Kedua, bagaimana sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Brunei Darussalam?. Ketiga, bagaimakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar? Keempat, bagaimana pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam ? Kelima, saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan tersebut. Dari identifikasi pokok persoalan diatas dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yaitu : "Bagaimana pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) ?"

Pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui postur Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dihadapkan pada pemberdayaan komponen cadangan. Nilai guna dari esai ini yaitu untuk mengetahui sejauhmana pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Metoda yang digunakan dalam memecahkan persoalan diatas, adalah deskriptif analisis melalui pendekatan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi atau referensi yang relevan dengan pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Maksud dari penulisan esai ini yaitu menyampaikan data dan fakta tentang pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Adapun tujuannya adalah memecahkan persoalan yang diangkat dalam tulisan esai ini sebagaimana disampaikan sebelumnya. Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada rumusan pokok-pokok persoalan yang disusun dengan tata urut pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan.

Berbicara masalah komponen cadangan tidak akan terlepas dari potensi yang ada di suatu negara baik sumber daya alam maupun sumber daya alam, sehingga orientasinya bagaimana potensi yang ada tersebut mampu dikembangkan menjadi angkatan ke empat yang siap didayagunakan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa komponen cadangan pada dasarnya merupakan kumpulan entitas yang terbentuk dari pengalokasian sumber daya nasional yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional, untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Konsep ini agak berbeda dengan yang dikenal di luar negeri sebagai "*reserve force*" atau "*kekuatan cadangan*" yang merupakan pasukan atau organisasi militer yang berisi serdadu warga negara atau "*citizen soldiers*", yang menurut Duffield, 2014 pembentukannya mengkombinasikan antara peran militer dan karir sipil. Walaupun komponen cadangan meliputi berbagai jenis sumber daya nasional, namun dalam berbagai diskursus, perhatian lebih difokuskan pada aspek entitas manusia atau warga negara terutama kaum sipil yang dipersiapkan untuk memperkuat militer sebagai komponen utama. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengupas lebih dalam terkait pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), mengingat Brunei Darussalam merupakan negara dengan luas wilayah yang sangat kecil dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara namun memiliki ekonomi yang boleh dikatakan cukup kuat dan maju. Dimana kemampuan ekonomi tersebut dapat dijadikan modal dalam mengembangkan kemampuan angkatan bersenjata non reguler atau komponen cadangan guna memperkuat atau meningkatkan tentara reguler yang sudah dibentuk sebelumnya.

Pendalaman terhadap Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dikaitkan dengan pemberdayaan komponen cadangan akan difokuskan kepada aspek sejarah singkat

angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan, sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Brunei Darussalam, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam, dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara, pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam, dan saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan negara Brunei Darussalam.

Sejarah singkat angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan.

Brunei Darussalam sebagai negara berdaulat dengan sistem pemerintahan kesultanan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984. Selepas memperoleh kemerdekaan, Brunei Darussalam selanjutnya membentuk Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang disusun menjadi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Tugas dan tanggung jawab Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei sangat menantang baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Mereka memainkan perannya masing-masing dalam menjaga keamanan dan kedamaian negara dengan menjaga perbatasan, berpatroli dan memantau keutuhan perbatasan dari agresi dan elemen jahat apa pun. Memang, tugas menjadi seorang prajurit sangat mulia. Tugas membela agama dan keutuhan wilayah negara sangat mulia. Ini adalah kewajiban agama dan tanggung jawab nasional. Angkatan bersenjata dari suatu negara dapat kita pahami sebagai sebuah satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara tersebut. Angkatan bersenjata dibentuk untuk menegaskan kebijakan domestik dan luar negeri pemerintah. Angkatan Bersenjata bisa terdiri dari satuan militer dan paramiliter.

Dalam mengupas sejarah singkat angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan berikut disampaikan data dan fakta Brunei Darrusalam merupakan negara yang terletak di utara pulau Kalimantan yang memiliki sumber kekayaan alam berlimpah. Dengan kekayaan yang berlimpah, Negara Brunei Darrusalam tentu harus memiliki kekuatan militer yang bisa melindungi kekayaan alamnya. Akan tetapi Brunei Darrusalam bukan termasuk negara yang memiliki sumber militer terbesar di dunia maupun di Asia Tenggara selain luas wilayahnya yang relatif kecil juga penduduknya pada tahun 2019 tercatat total populasi 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Dalam populasi tersebut, warganegara Brunei berjumlah 331.800 orang, dan sisanya terdiri dari warganegara asing dengan 33.500 orang berstatus Permanent Residents dan 94.200 orang berstatus *Temporary Residents*. Dilansir dari Zonajakarta.com dari *globalfirepower*, Brunei Darrusalam diketahui hanya memiliki 10.000 personel militer aktif serta hanya beberapa alutsista darat, udara serta laut.

Berdasarkan kepada data dan fakta diatas, maka latar belakang sejarah singkat angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan adalah sampai saat ini Brunei Darussalam belum secara serius menetapkan kebijakan tentang pemberdayaan komponen cadangan, hal ini disebabkan Brunei Darrusalam selama ini jarang mengalami permasalahan dengan beberapa negara tetangganya.



Angkatan Bersenjata Brunei Darrusalam

Disamping itu, sumber daya manusia yang terbatas serta adanya kebijakan sesuai konstitusi Brunei bahwa dinas militer tidak wajib pada populasi tertentu. Bagi pemerintah Brunei Darussalam kehadiran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang terdiri dari angkatan darat, laut dan udara sudah cukup untuk menjaga kedaulatan wilayah yang luasnya sekitar 5,765 km, dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei.



Peta Wilayah Negara Brunei Darussalam

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Brunei Darussalam.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, definsi dari komponen cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Konsep komponen cadangan dalam persepektif luar negeri diartikan sebagai “*reserve force*” atau “*kekuatan cadangan*” yang merupakan pasukan atau organisasi militer yang berisi serdadu warga negara atau “*citizen soldiers*”, menurut Duffield, 2014 pembentukannya mengkombinasikan antara peran militer dan karir sipil.

Bagi Brunei Darussalam yang memiliki sumber daya manusia relatif sedikit maka pemanfaatannya diarahkan untuk memasok Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang menjadi bagian utama dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam. Sehingga ketergantungan kepada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) cukup besar termasuk dalam hal rekrutmen.

Bagi Negara Brunei Darussalam, penyelenggaraan pertahanan yang bertumpu pada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) sudah cukup untuk mewakili komponen cadangan. Hal ini berdasarkan data dan fakta, Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei menggunakan berbagai macam peralatan militer buatan luar negeri, yang sebagian besar dibeli dari Inggris, Prancis/Eropa, dan Amerika Serikat. Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei adalah angkatan bersenjata terbesar, yang terdiri dari tim kecil angkatan laut dan udara. Meskipun Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei tidak memiliki pengalaman tempur, sering mengatur operasi di daerah sekitarnya untuk misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian. Brunei juga memiliki hubungan militer yang luas dengan Singapura.

Mendasari kepada penjelasan diatas, dapat diuraikan bahwa sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Brunei Darussalam belum ada dan dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh konstitusi yang berlaku di negara Brunei Darussalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan sistem pertahanan cukup diwakili oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang berasal dari etnik-etnik Melayu terdiri dari suku kaum asli Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong sebagaimana didefinisikan di dalam konstitusi Brunei. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa komponen cadangan bagi negara Brunei Darussalam bukan kebutuhan mendesak sehingga tidak diatur dalam konstitusi yang berlaku. Disamping itu, hubungan diplomatik dengan negara-negara kawasan dan diluar kawasan yang cukup baik menjadikan Brunei Darussalam minim dengan konflik, karena pada dasarnya kehadiran komponen cadangan disuatu negara tidak

terlepas dari adanya ancaman yang berasal dari luar.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam.

Sampai saat ini negara Brunei Darussalam dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara tidak dilengkapi oleh komponen cadangan sehingga pengorganisasian dan penggunaan komponen cadangan tersebut belum masuk dalam agenda pembangunan dan peningkatan kemampuan kekuatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Walaupun secara finansial, Brunei Darussalam mampu mengembangkan komponen cadangan yang setara dengan tentara reguler kemampuannya. Walaupun ada *Gurkha Reserve Force (PSG)* yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata Brunei Darussalam setelah koloni Inggris ini memperoleh kemerdekaan, namun mereka bukan komponen cadangan yang sengaja disiapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam.

Pengorganisasian dan penggunaan komponen cadangan apabila berhasil diberdayakan akan menjadi bagian dari sistem pertahanan negara sehingga kebijakan dan strategi pertahanan yang diterapkan akan memadukan antara komponen utama dan komponen cadangan. Mengingat, Brunei Darussalam belum memiliki komponen cadangan maka pengorganisasian dan penggunaan komponen tidak menjadi prioritas dalam susunan organisasi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Hal ini dapat dilihat pada data dan fakta diantaranya pembangunan pertahanan negara Brunei Darussalam senantiasa dilaksanakan secara terintegratif yang bertumpu pada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), hal ini dilakukan seiring dengan pembangunan keamanan nasional yang berorientasi pada terjaminnya kepentingan nasional di tingkat global, regional dan nasional, baik menyangkut keamanan nasional maupun kepentingan ekonomi.

Berdasarkan kepada data dan fakta diatas, maka organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam, terutama ketika

dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar belum dimobilisasi sedemikian rupa. Hal ini disebabkan oleh Brunei Darussalam tidak mempersiapkan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara yang mereka bangun sejak mendapatkan kemerdekaan kemerdekaan dari Inggris pada 1 Januari 1984 sampai saat ini. Karena komponen cadangan bagi Brunei Darussalam merupakan sesuatu hal yang sulit diwujudkan apabila ditinjau dari aspek sumber daya manusia yang terbatas dimana populasi jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Perincian populasi tersebut, terdiri dari warganegara Brunei berjumlah 331.800 orang, dan sisanya terdiri dari warganegara asing dengan 33.500 orang berstatus Permanent Residents dan 94.200 orang berstatus Temporary Residents (JPKE, 2021). Disamping itu, Brunei Darussalam juga mendapat perlakuan khusus dari negara maju dan kuat dari segi militer yaitu AS dan Inggris, apabila terjadi penyerangan kepada Brunei Darussalam, kedua negara tersebut tidak akan tinggal diam, mengingat jika Brunei Darussalam diserang maka pasokan energi ke beberapa negara sekutu Amerika Serikat akan terganggu.

Pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam.

Sampai saat ini Brunei Darussalam belum memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk diberdayakan sebagai komponen cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Dimana rujukan dalam proses pembangunan sistem pertahanan negara Brunei Darussalam didasari oleh perencanaan pertahanan (*defence planning*) yang bertumpu pada kemampuan sendiri. Terkait dengan pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam berikut ini disampaikan data dan fakta yaitu secara normatif Negara Brunei Darussalam dalam membangun dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara tidak menerapkan sistem pertahanan negara yang bertumpu pada

terbentuknya komponen cadangan. Hal ini dapat kita pahami, karena sumber daya manusia yang terbatas, luas wilayah kedaulatan tidak begitu luas, adanya jaminan keamanan dari negara-negara maju seperti AS dan Inggris akan keselamatan bangsa dan negara Brunei Darussalam apabila mendapat serangan dari luar.

Sehingga pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam bukan menjadi skala prioritas dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, sangat jelas bahwa pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam belum dilaksanakan bahkan tidak ada sama sekali, dikarenakan sampai detik ini komponen cadangan tidak termasuk dalam agenda pembangunan sistem pertahanan negara Brunei Darussalam.

Sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran pertahanan yang telah dialokasikan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) seperti modernisasi alutsista, meningkatkan profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan latihan yang diadakan di dalam negeri maupun mengirimkan utusan ke luar negeri salah satunya Seskoad.

Mengalir dari pemaparan tentang sejarah singkat angkatan bersenjata negara Brunei Darussalam terkait dengan komponen cadangan, sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Brunei Darussalam, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Brunei Darussalam, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar serta pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan negara Brunei Darussalam, maka dapat dipetakan Pemberdayaan Komponen Cadangan Dalam Perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) melalui analisis SWOT sebagai berikut :

- a. **Strengths** (Kekuatan). Aspek kekuatan, Brunei Darussalam memiliki Potensi yang cukup baik untuk menyusun rencana pemberdayaan komponen cadangan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) apabila dikaitkan dengan faktor pembiayaan. Berdasarkan data dan fakta Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang maju dari perekonomian sehingga mampu untuk mengalokasikan pembiayaan untuk pemberdayaan komponen cadangan.
- b. **Weaknesses** (Kelemahan). Sumber daya manusia yang terbatas dengan latar belakang berbeda atau multietnis merupakan kelemahan bagi Brunei Darussalam dalam memasukan agenda pemberdayaan komponen cadangan, karena bagaimanapun juga sumber daya manusia memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara
- c. **Opportunities** (Peluang). Brunei Darussalam memiliki peluang dalam pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) apabila orientasi dari komponen cadangan tidak bertumpu pada aspek sumber daya manusia saja namun sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai komponen cadangan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) contohnya adalah modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan meningkatkan kesejahteraan maupun pendidikan di luar negeri.
- d. **Threats** (Ancaman). Ditinjau dari sudut ancaman terhadap pemberdayaan komponen cadangan dalam perspektif Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yaitu keterpaduan sipil dan militer dalam sistem pertahanan negara mengingat adanya ketentuan yang "boleh" aktif dinas kemiliteran berasal dari etnis Melayu terdiri dari ras asli Belait, Bisaya, Brunei, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong sedangkan diluar etnis tersebut tidak wajib dinas militer.

Mendasari penjelasan diatas maka *Lesson learned* untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan negara Brunei Darussalam, yakni :

Pertama, Walaupun negara Brunei Darussalam belum melaksanakan pemberdayaan komponen cadangan namun dihadapkan pada kebijakan yang "boleh" aktif dinas kemiliteran berasal dari etnis Melayu sedangkan diluar etnis tersebut tidak wajib dinas militer, perlu menjadi atensi bagi TNI AD dalam melaksanakan pembinaan teritorial harus bersifat menyeluruh dan komprehensif terhadap masyarakat Indonesia yang multi-etnis dengan mengesampingkan latarbelakang mereka yang berbeda artinya semua masyarakat harus dirangkul sesuai konsep pertahanan semesta yang dianut bangsa Indonesia.



Angkatan Bersenjata Brunei Darrusalam

Kedua, TNI AD mampu mengatasi isu-isu yang berkembang seputar wajib militer dan bela negara dimana saat ini menjadi fokus pembicaraan di kalangan masyarakat awam, sehingga perlu untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya terkait hal tersebut. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang substansinya berkaitan dengan pembentukan komponen cadangan.



Angkatan Bersenjata Brunei Darrusalam



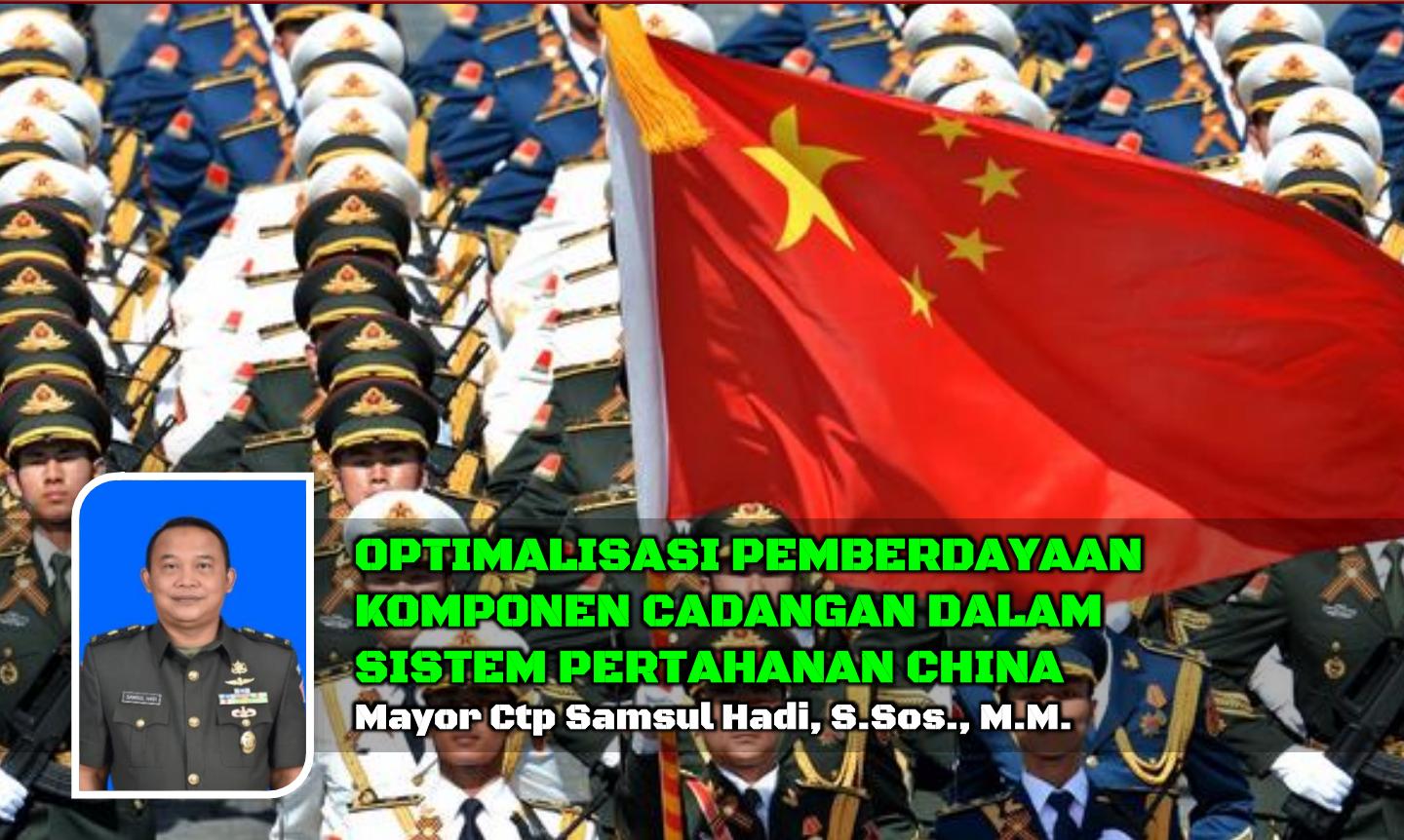
Angkatan Bersenjata Brunei Darrusalam

Penutup

Sampai saat ini Brunei Darussalam belum secara serius menetapkan kebijakan tentang pemberdayaan komponen cadangan, hal ini disebabkan Brunei Darrusalam selama ini jarang mengalami permasalahan dengan beberapa negara tetangganya. Disamping itu, sumber daya manusia yang terbatas serta adanya kebijakan sesuai konstitusi Brunei bahwa dinas militer tidak wajib pada populasi tertentu. Bagi pemerintah Brunei Darussalam kehadiran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang terdiri dari angkatan darat, laut dan udara sudah cukup untuk menjaga kedaulatan wilayah yang luasnya sekitar 5,765 km.

Pemberdayaan komponen cadangan yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sangat penting untuk dipahami oleh seluruh komponen bangsa terutama prajurit TNI AD. Oleh karena itu, tuntutan yang utama bagi prajurit TNI AD adalah memahami substansi dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut seperti bagaimana menumbuhkan kesadaran setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

**Mayor Cba Ahmad Maulana, S.E. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**



OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN CHINA

Major Ctp Samsul Hadi, S.Sos., M.M.

PENDAHULUAN

Posisi China di Kawasan Asia ini diperkuat seiring dengan naiknya Xi Jinping sebagai presiden China pada tahun 2012 dengan mengusung slogan *Chinese Dream* pada kampanyenya. *Chinese Dream* merupakan arah kebijakan luar negeri China yang bertujuan untuk memperbarui China dan mengembalikannya kepada masa kejayaannya di masa lalu sebagai negara yang berpengaruh di Asia. Arah kebijakan luar negeri tersebut telah memaksa China untuk mempercepat proses modernisasi sistem pertahanannya.

Selain peningkatan kemampuan dan kualitas kekuatan militer sebagai komponen utama pertahanannya, namun China juga mulai membuka peluang terhadap bergabungnya komponen cadangan dalam sistem pertahanan negaranya, sebagai upaya semesta untuk tujuan pertahanan dengan menggunakan potensi dan sumber daya nasional. Adapun pembentukan komponen cadangan di China dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pertahanan guna mempersiapkan potensi nasional bagi kepentingan pertahanan yang siap digunakan. Pengembangan komponen cadangan juga memberikan ruang atau opsi penggunaan kekuatan yang fleksibel sesuai dengan

ketersediaan dan relevansinya dengan perkembangan situasi, terutama dalam situasi keadaan darurat yang diikuti dengan pernyataan mobilisasi.

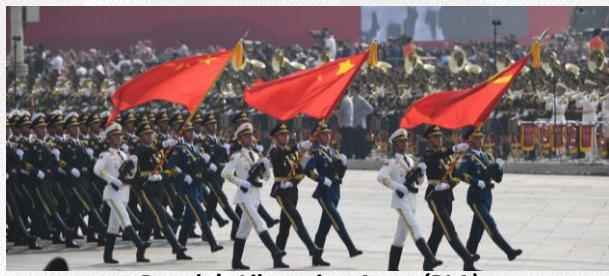
Maka dari itu, pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui urgensi China dalam pelaksanaan pemberdayaan komponen cadangan pertahanan negara guna mewujudkan arah kebijakan luar negeri yaitu *Chinese Dream*. Adapun maksud dan tujuan dari pada penulisan esai ini adalah untuk mengetahui pembentukan komponen cadangan pertahanan China dan memberikan saran serta masukan bagi TNI AD terkait dengan pengembangan komponen cadangan pertahanan negara Indonesia, belajar dari apa yang diketahui melalui pembentukan komponen cadangan pertahanan China.

Ruang lingkup penulisan esai ini adalah mengenai pemberdayaan komponen cadangan pertahanan China yang akan dibahas dengan berorientasi pada lima persoalan sebagai berikut: **pertama**, sejarah singkat angkatan bersenjata China terkait dengan komponen cadangan. **Kedua**, sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di China. **Ketiga**, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam

sistem pertahanan China, terutama dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara. **Keempat**, pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam China. **Kelima**, saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan, dimana dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan teknik analisa SWOT.

Pembahasan

Sejarah Singkat AB China Terkait Komponen Cadangan Pasukan militer pertama China disebut sebagai Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army (PLA)* yang merupakan organisasi terpadu dari semua angkatan darat, laut, dan udara China, serta *Second Artillery Force*, sebuah satuan yang menangani peluru kendali strategis. Pasukan ini terdiri dari tentara dan rakyat China yang secara sukarela bergerak membantu pergerakan militernya untuk membendung Pemberontakan Nanchang. Alhasil karena kekuatan komponen utama dan komponen cadangan pertahanan negara China yang dipadukan secara strategis, maka pasukan ini menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, dengan jumlah personel yang mencapai lebih dari dua juta anggota. Berbeda dengan di kebanyakan negara lain, militer China tidak bisa dipisahkan dari urusan politik. Karena sejak awal berdirinya PLA, pusat komandonya berada di bawah partai dan sebagian besar pejabat PLA memang berasal dari pejuang-pejuang yang memiliki motif politik.



People's Liberation Army (PLA)

Pada Mei 2015, China mengeluarkan Buku Putih pertama yang khusus membahas tentang strategi militer, yaitu *China's Military Strategy*. Berisi tentang pedoman menyeluruh dan cetak biru pembangunan dan pekerjaan angkatan bersenjata China.

Secara khusus, publikasi "Strategi Militer China" mengartikulasikan inovasi dalam pemikiran keamanan nasional China di tiga bidang utama: pemahaman baru dari kerangka politik bagi kekuatan militer, pemberdayaan kekuatan komponen cadangan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama keamanan, dan kemampuan memproyeksikan kekuatan global bagi PLA. China mulai secara terbuka menunjukkan kapasitasnya untuk berpartisipasi aktif secara global dalam urusan keamanan internasional.

Inovasi lainnya, China ingin membangun kekuatan militer yang mampu memproyeksikan kekuatan terbatas di seluruh domain, dengan mengkombinasikan kekuatan militer dan kekuatan sipil yang disebut sebagai komponen cadangan. Sesuai dengan strategi pertahanan dan mempertimbangkan kondisi geografisnya, China lebih menitikberatkan pertahanannya ke wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik dan sengketa dengan negara tetangga, terutama di daerah yang berbatasan dengan wilayah laut internasional seperti Laut China Timur dan Laut China Selatan. Karena itu pasukan angkatan darat dan angkatan laut lebih banyak disebar di pos-pos yang berbatasan langsung dengan wilayah internasional, dibantu dengan masyarakat yang hidup di sekitaran wilayah tersebut. Saat ini, China telah memiliki 800.000 orang komponen cadangan yang disebut sebagai tentara cadangan.



People's Liberation Army (PLA)

Sistem Rekrutmen Komponen Cadangan Untuk Kepentingan Pertahanan Di China

Upaya untuk mempertahankan negara merupakan tugas militer sebagai komponen utama, yang disebut sebagai tentara China, namun demikian upaya bela negara dapat dilakukan melalui berbagai profesi yang disandang oleh masing-masing warga negara.

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. China sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Hal ini dibentuk untuk bersiap tanpa menunggu ancaman tiba di depan mata, di tengah ancaman *proxy* yang kini meluas keberbagai negara di dunia.

China mengupayakan dengan keras agar pertahanannya mampu bertahan dari segala bentuk ancaman kedepan. Untuk menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien maka komponen cadangan menjadi prioritas. Pemerintah China mengerahkan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi. Anggota yang dikerahkan mencakup pegawai negeri sipil, pekerja/buruh yang telah memenuhi sejumlah persyaratan.

Sistem rekrutmen komponen cadangan pertahanan China dikoordinir langsung oleh Kementerian Pertahanan China yang terlebih dahulu diawali dengan membuka seleksi pendaftaran program komponen cadangan bagi masyarakat sipil. Selanjutnya, para komponen cadangan yang lolos beragam seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan China akan langsung menerima pelatihan dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika proses rekrutmen sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan China, maka untuk pelatihan akan sepenuhnya dilakukan oleh tentara China.

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di China menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara, sehingga dalam sistem rekrutmennya sangat berorientasi pada sekala prioritas agenda reformasi sektor keamanan terutama pembangunan militer China sebagai komponen utamanya.

Alutsista merupakan perlengkapan yang menandai kekuatan jenis alat tempur yang dimiliki negara dan personil adalah kekuatan

utama dan kekuatan cadangan yang dimiliki negara. Kekuatan utama terletak pada kuantitas dan kualitas pasukan militernya sedangkan kekuatan cadangan adalah jumlah rakyatnya yang mampu membela negara, karena itu, kekuatan alutsista dan kekuatan personil sangat menentukan efektifitas pertahanan terhadap ancaman lawan yang mengganggu dan merusak kondisi aman dan stabilitas negara. Oleh sebab itulah kepentingan nasional melalui instrumen modernisasi kekuatan komponen cadangan adalah salah satu bentuk power bagi negara untuk bertahan dalam struktur internasional yang anarkis.



Alutsista People's Liberation Army (PLA)

Bentuk Organisasi dan Penggunaan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan China.

Dalam konteks keamanan, upaya menjaga setiap jengkal wilayah negara harus dikelola dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Selain militer dan polisi, masyarakat juga harus menjadi bagian yang terintegral dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan komponen cadangan sangat penting dalam sistem kemiliteran suatu negara. Komponen Cadangan di China saat ini telah disebut sebagai tentara cadangan, dengan kejelasan tugas yaitu untuk membantu komponen utama menghadapi ancaman-ancaman tertentu. Keberadaan komponen cadangan dalam konteks pertahanan negara menjadi hal yang secara bertahap wajib ada. Perubahan ancaman keamanan yang tidak hanya berdimensi militeristik membuat pendekatan terkait keberadaan komponen cadangan tersebut. Karenanya, sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar, pemerintah China melalui kementerian Pertahannya memiliki kepentingan untuk menyiapkan

institusi bagi perkuatan komponen cadangan bagi komponen utama pertahanan Negara.

Di China komponen cadangan secara khusus dibentuk dalam sebuah institusi atau lembaga resmi di bawah Kementerian Pertahanan, dengan kualifikasi untuk dapat bergabung dalam dan menjalankan fungsi seperti komponen utama, sehingga mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan, serta kompensasi gaji serta jaminan sosial yang layak. Walau demikian, komponen cadangan bisa bersifat *voluntary* (dari *civilians*) dengan rekrutmen melalui pendaftaran atau aplikasi, wajib militer, atau otomatis diambil dari mantan prajurit dan kekuatan-kekuatan yang sudah siap. Ada tiga alasan mengapa komponen cadangan menjadi kebutuhan penting dalam perkuatan pertahanan Negara, yaitu: Pertama, komponen cadangan merupakan upaya untuk mewujudkan arah kebijakan nasional China untuk menjadi penguasa, sehingga keberadaan komponen cadangan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Negara, di samping komponen utama. Kedua, karakter ancaman baik yang bersifat militer maupun nir-militer terhadap kedaulatan Negara makin kompleks.

Perkuatan personil dan kemampuan pada komponen cadangan menjadi salah satu dari sejumlah langkah dalam mengantisipasi berbagai ancaman tersebut. Ketiga, perkuatan pertahanan Negara dengan pendekatan pada pelibatan kekuatan komponen cadangan menjadi pilihan China guna melibatkan segenap potensi rakyatnya dalam menjaga dan menpertahankan kedaulatan.

Pola Pembinaan dan Pemeliharaan Kemampuan Komponen Cadangan Untuk Kepentingan Pertahanan China

Pertahanan Negara diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan dibangun secara terus-menerus di masa damai, masa perang dan pasca perang.

Usaha mewujudkan komponen cadangan dengan mendayagunakan peran komponen utama Komponen Cadangan adalah terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sumber daya manusia sebagai komponen cadangan, berhak atas bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap negaranya. Perkembangan memperlihatkan munculnya China sebagai negara adidaya baru dengan berbagai tantangan yang dihadapinya secara logis dari negara adidaya dan *big powers* di berbagai kawasan, di bidang ekonomi, militer dan politik.

Esensi dari komponen cadangan pada struktur militer adalah tidak melebihi jumlah personel komponen utama. China merekrut komponen cadangannya hampir dua atau tiga kali jumlah pasukan regulernya, akan tetapi tidak melebihi jumlah personil regulernya. Dalam pengertian bahwa komponen cadangan merupakan pendukung dari tugas dan fungsi komponen utama. Hal utama yang membedakan antara komponen utama dan komponen cadangan adalah pada keberlangsungannya dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sekedar ilustrasi, seseorang yang menjalani kontrak sebagai personil komponen cadangan akan memiliki batas waktu yang terbatas dibandingkan dengan personil yang regular. Apabila digambarkan secara umum, tentara cadangan di China akan menjalani masa bakti selama waktu yang ditentukan, dan selanjutnya secara sukarela dapat diperpanjang setelah masa bakti sebelumnya telah berakhir. Selama masa bakti tersebut berlangsung dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki.

Saran dan Masukan Untuk TNI AD Terkait Dengan Komponen Cadangan

Globalisasi sebagai suatu proses yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan eksistensi dan intensitas yang tinggi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan

membuat dunia semakin transparan sehingga terkesan tanpa adanya batas negara. Hal ini mendorong terjadinya penyesuaian secara cepat dan mendasar dalam aspek pertahanan China. Sebagai sebuah negara yang memiliki arah kebijakan luar negeri untuk memperbaikinya China dan mengembalikannya kepada masa kejayaannya, maka China harus mampu mentransformasikan kekuatan dan pengaruh kekuatan pertahanan negaranya yang bersifat peluang untuk menjadi kekuatan nasional untuk itulah optimalisasi pemberdayaan komponen cadangan pertahanan negara diperlukan. Keseriusan China dalam mengoptimalkan pemberdayaan komponen cadangan merupakan hal yang harus di contoh oleh Indonesia.



People's Liberation Army (PLA)

Penutup

China adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia. Negara ini merupakan salah satu negara yang besar dengan sistem politik yang berbentuk komunis dan sistem ekonomi yang kapitalis, China tumbuh menjadi negara adidaya yang disebut-sebut menyaingi Amerika Serikat.



People's Liberation Army (PLA)

Perkembangan memperlihatkan munculnya China sebagai negara adidaya baru dengan berbagai tantangan yang dihadapinya secara logis dari negara adidaya dan big powers di berbagai kawasan, di bidang ekonomi, militer dan politik. Situasi dunia dewasa ini, yang ditandai dengan munculnya negara adidaya baru, China, dalam kenyataannya secara otomatis tidak menjamin terciptanya kondisi dunia yang ditandai dengan stabilitas keamanan.

Menyadari akan posisinya sebagai negara yang ingin berkuasa dan memiliki banyak musuh maka saat ini China mulai melakukan optimalisasi pemberdayaan terhadap komponen cadangan pertahanan negaranya. Dalam konteks tersebut, keberadaan komponen cadangan sangat penting dalam sistem kemiliteran suatu negara. Komponen Cadangan di China saat ini telah disebut sebagai tentara cadangan, dengan kejelasan tugas yaitu untuk membantu komponen utama menghadapi ancaman-ancaman tertentu.

Adapun *lesson learned* yang dapat diambil oleh TNI AD dalam mengoptimalkan pemberdayaan komponen cadangan untuk mendukung tugas dalam menjaga pertahanan negara adalah dengan menetapkan terlebih dahulu kebijakan yang jelas mengatur mengenai peran komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara. Adapun kebijakan tersebut dirumuskan berdasarkan hasil survei dan pemetaan yang dilakukan oleh TNI AD mengenai kebutuhan akan kehadiran komponen cadangan. Kemudian, setelah kebijakan tersebut disahkan, TNI AD merumuskan indikator-indikator yang perlu dicapai dalam rekrutmen komponen cadangan dan dalam pembinaan yang dilakukan kepada komponen cadangan, perumusan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan ancaman pertahanan negara yang dialami oleh Indonesia saat ini.

**Major Ctp Samsul Hadi, S.Sos., M.M.
adalah Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**



KONSEP PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN MELALUI PENERAPAN WAJIB MILITER DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA KOLOMBIA

Major Cpl Arief Hernawan, S.T.

PENDAHULUAN

Dalam upaya pertahanan sebuah negara, masing-masing negara memiliki kekhasan dan strategi tersendiri dalam membangun kemampuan pertahanannya. Komponen Cadangan menjadi pilihan yang rasional bila dikaitkan dengan konsep pertahanan negara yang bersifat semesta. Komponen cadangan pertahanan negara adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Penyiapan komponen cadangan pertahanan negara di darat disiapkan sebagai kekuatan pengganda pertahanan matra darat dan sebagai wujud kesemestaan pertahanan darat negara. Banyak negara-negara besar yang telah menerapkan sistem ini namun dengan cara yang berbeda. Ada yang membentuk tentara cadangan secara resmi seperti *the Army Reserve of United Kingdom*, ada yang melalui state guard atau bahkan sekedar *home guard* seperti *the United State National Guard, the Norwegian Home Guard, the Swedish Home Guard* atau *the Danish Home Guard*. Ada pula yang menerapkan wajib militer dalam beberapa waktu tertentu seperti Kolombia, Singapura, Norwegia, Israel dan Taiwan.

Kolombia merupakan salah satu negara yang menerapkan wajib militer guna memperkuat sistem pertahanan negara. Di samping pelatihan militer, keterampilan lain di luar bidang militer juga dibutuhkan karena berbagai keterampilan juga sering kali berguna dalam dunia militer. Oleh karena itu, mereka juga diberi berbagai macam keterampilan lain untuk memperkaya kekuatan militer. Pembentukan kekuatan cadangan tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, mengatasi situasi yang tidak terduga atau sekedar memanfaatkan peluang. Melalui penerapan Wajib Militer, mereka terbukti telah dapat menciptakan pertahanan militer yang cukup tangguh dan membentuk daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman yang ada baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Penerapan Wajib Militer yang dilakukan oleh negara Kolombia telah dapat menciptakan daya tangkal bagi bangsa tersebut. Efek tangkal yang diciptakan bagi ancaman militer sudah jelas karena dengan adanya Wajib Militer tentunya akan memperbesar postur pertahanan militer khususnya dalam kesiapan komponen cadangannya untuk memperkuat komponen utama.

Dihadapkan dengan kemungkinan ancaman tersebut, maka pemberdayaan komponen cadangan dengan adanya penerapan Wajib Militer, setidaknya akan membentuk semangat bela negara, rasa cinta tanah air yang dapat diaplikasikan oleh warga negara Kolombia yang telah mengikuti Wajib Militer.

Mencermati uraian latar belakang penjelasan diatas, maka dapat diidentifikasi persoalan yaitu : **Pertama;** Bagaimana sejarah singkat angkatan bersenjata negara Kolombia terkait dengan komponen cadangan?; **Kedua;** Bagaimanakah sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kolombia?; **Ketiga;** Bagaimanakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negeri?; **Keempat;** Bagaimanakah pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Kolombia; **Kelima;** Apa saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan? Dari identifikasi persoalan tersebut, sehingga penulis akan menguraikan suatu esai yang membahas rumusan masalah yaitu "Bagaimana pemberdayaan komponen cadangan melalui penerapan wajib militer dalam sistem pertahanan negara Kolombia?". Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis mencoba menganalisa dari berbagai sudut pandang yang ada.

Adapun nilai guna dari penulisan esai ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemberdayaan komponen cadangan melalui penerapan wajib militer dalam sistem pertahanan negara Kolombia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis yaitu cara menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi data-data dan fakta yang ada. Selain itu, penulis menggunakan metode Analisis SWOT dalam menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber atau referensi kepustakaan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dari pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk

kepentingan pertahanan dalam negara Kolombia. Adapun ruang lingkup pembahasan meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup, dibatasi pada aspek pemberdayaan komponen cadangan melalui wajib militer di negara Kolombia sesuai dengan pokok-pokok persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pembahasan.

Republik Kolombia adalah negara berdaulat yang sebagian besar wilayahnya berada di daratan Amerika Selatan. Kolombia memiliki beberapa pulau di lepas pantainya. Kolombia adalah negara yang memiliki banyak etnis dan bahasa. Warisan budayanya kaya akan pengaruh Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan pribumi. Sebagian besar kota di Kolombia berada di Pegunungan Andes dan pesisir Karibia. Kolombia adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat laut benua Amerika Selatan. Secara geografisnya, Kolombia yang dibentuk oleh dua lempeng yaitu lempeng lautan Pasifik dan lautan Karibia ini berbatasan dengan Venezuela dan Brasil di sebelah Timur dan berbatasan dengan Panama dan samudera Pasifik di sebelah baratnya.

Di sebelah Selatannya, Kolombia berbatasan dengan Peru dan Ekuador sedangkan di sebelah Utaranya adalah Laut Karibia. Sekitar 72% wilayah Kolombia adalah Kawasan Hutan yang lebat. Kolombia yang merupakan negara bekas jajahan Spanyol ini adalah salah satu dari negara yang muncul setelah pembubarannya *Gran Colombia* (Kolombia Raya).



Peta Wilayah Negara Kolombia

Dua Negara lainnya yang berasal dari Gran Colombia adalah negara Ekuador dan Venezuela. Secara resmi, Gran Colombia berdiri pada tanggal 17 Desember 1819 dan dibubarkan pada tanggal 19 November 1831. Kota Bogota yang saat ini adalah Ibukota Kolombia menjadi Ibukota negara Gran Colombia. Kata Kolombia berasal dari nama seorang penjelajah Italia yaitu Christopher Columbus.

Sejarah singkat angkatan bersenjata negara Kolombia terkait dengan komponen cadangan.

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan Kolombia didasarkan pada konsep pertahanan total yang diamanatkan oleh Strategi Keamanan Nasional Kolombia. Tujuan dari kebijakan pertahanan Kolombia adalah untuk mempersiapkan masyarakat untuk pertahanan umum dan untuk mengintegrasikan Kolombia ke dalam struktur pertahanan dan keamanan.

Kementerian pertahanan bertanggung jawab untuk pasukan tempur, pencarian dan penyelamatan, dan operasi intelijen. Pembangunan sistem pertahanan yang kuat ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman serta gangguan, maka Kolombia menerapkan sistem pertahanan total dan tanpa syarat. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pertahanan Kolombia melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah Kolombia. Diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman terutama ancaman dari luar negeri. Sebagai kekuatan inti dari sistem pertahanan negara Kolombia adalah Angkatan Bersenjata dan rakyat sebagai komponen cadangan.

Angkatan Bersenjata Kolombia (*Fuerzas Militares de Colombia*) terdiri dari Angkatan Darat Kolombia, Angkatan Laut Kolombia dan Angkatan Udara Kolombia serta National Police Kolombia. Angkatan Darat terdiri dari 180.000 personel di tujuh divisi infanteri dan sejumlah unit khusus, dibandingkan dengan 23.000 di Angkatan Laut dan 10.000 di Angkatan Udara. Polisi Nasional Kolombia (CNP) yang beranggotakan 160.000 orang adalah bagian dari Kementerian Pertahanan dan bekerja dengan Angkatan Darat dalam peran keamanan internalnya melawan paramiliter. Sementara itu dikaitkan dengan komponen cadangan, negara Kolombia memiliki personel cadangan sebanyak 34.950. Kolombia wajibkan warga berusia 18 tahun untuk melakukan wajib militer selama 18 bulan (Angkatan Darat dan Udara), 24 Bulan (Angkatan Laut) dan 12 Bulan (Polri).

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kolombia.

Dalam pemenuhan strategi pertahanan negara Kolombia, elemen pertahanan Negara Kolombia dibagi menjadi 2 komponen yaitu pasukan regular yang merupakan unsur utama dan kekuatan inti pertahanan Negara meliputi Angkatan Bersenjata Kolombia serta pasukan cadangan yang merupakan kekuatan pendukung. Gabungan kedua pasukan tersebut digunakan terutama pada saat mengaplikasikan strategi pertahanan secara menyeluruh dimana kemampuan utama pasukan regular yang diinginkan adalah mampu berdiri sendiri dalam menghadapi setiap ancaman dari luar dengan mengadopsi pertahanan dan keamanan Negara menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Dengan menerapkan strategi tersebut Kolombia wajibkan setiap warga Negara untuk mengikuti wajib militer pada saat Negara dalam keadaan darurat. Dengan demikian struktur organisasi yang ada dan jumlah kekuatan militer dari segi personel relative

sedikit dan mudah untuk digerakkan dan dikembangkan sesuai dengan yang diinginkan. Karena pemenuhan kebutuhan dan daya dukung komponen cadangan akan mudah didapat.

Pembahasan mengenai sumber daya manusia pertahanan yang diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan negara Kolombia meliputi militer aktif, wajib militer, komponen cadangan dan komponen pendukung. Militer aktif dan wajib militer dalam kaitannya dengan kedinasan hampir sama, hanya saja untuk wajib militer dibatasi masa baktinya sesuai dengan aturan dari negara. Secara umum, militer aktif adalah warga negara yang bekerja penuh dalam organisasi militer resmi suatu negara yang independen dengan ruang lingkup bidang pertahanan dan keamanan.

Anggota militer aktif bertugas mempertahankan keutuhan negara dari ancaman militer negara lain atau ancaman yang datang dari kelompok bersenjata. Tentunya tanggung jawab besar yang dipegang kuat sehingga anggota militer aktif bersiap mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Wajib militer adalah warga negara usia muda yang diwajibkan masuk dinas militer dalam kurun waktu tertentu. Tujuan wajib militer ini karena negara membutuhkan tambahan sumber daya pertahanan negara di garis kedua disamping militer aktif untuk tujuan tertentu.

Menurut Pasal 165 Konstitusi Kolombia mengemukakan bahwa semua orang Kolombia terikat ikut wajib militer. Undang-undang dinas militer menetapkan bahwa semua pria Kolombia, setelah mencapai usia delapan belas tahun, wajib untuk ikut dalam dinas militer. Laki-laki Kolombia wajib mengikuti dinas militer sampai usia lima puluh tahun. Laki-laki di atas usia tiga puluh tahun yang telah memenuhi persyaratan dinas militer mereka dianggap anggota cadangan militer sampai mencapai usia empat puluh lima tahun; mereka yang berusia di bawah tiga puluh tahun yang telah menyelesaikan dinas militer mereka akan dipanggil terlebih dahulu dalam keadaan darurat nasional.

Adapun Pentahapan Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kolombia yaitu warga negara Kolombia yang berjenis kelamin laki-laki pada saat mereka berusia 18 tahun mereka ditransfer dalam golongan persiapan dinas militer. Kemudian saat mereka berumur 19 tahun mereka akan dikirim surat untuk melakukan pemeriksaan fisik dan mental untuk diselidiki apakah seseorang tersebut dapat mengikuti atau tidak dalam waktu dan tempat yang ditentukan.

Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan mental selanjutnya seseorang tersebut akan menunggu surat pemberitahuan dari Direktur urusan militer daerah yang berisi penugasan kewajiban dinas militer kepada orang yang diwajibkan, menggunakan jaringan informasi ataupun pos surat. Setelah menerima surat pemberitahuan mengenai kewajiban untuk melaksanakan dinas militer maka seseorang itu wajib hadir untuk melaksanakan dinas militer pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Saat melakukan pemeriksaan untuk mengikuti wajib militer, dokter khusus wajib militer ataupun perwira medis memberi rating apakah seseorang tersebut layak atau tidak untuk menjalani dinas militer. Rating ini terdiri dari 7 level, angka level yang semakin kecil menunjukkan bahwa seseorang tersebut sehat dan layak untuk mengikuti dinas militer. Level 1 sampai dengan level 3 mereka layak untuk mengikuti dinas militer dan biasanya akan segera menerima surat panggilan untuk menjalani dinas militer. Saat seseorang tersebut berada di level 4 biasanya mereka dialihkan ke golongan tambahan. Bagi mereka yang berada di level 5, mereka tidak dapat mengikuti dinas militer sebagai yang aktif maupun tambahan tetapi, dapat digolongkan kedalam buruh masa perang. Seseorang yang berada di level 6 adalah mereka yang tidak memiliki gangguan penyakit maupun mental. Seseorang yang berada di level 7, mereka adalah orang-orang yang sulit diperiksa karena ada penyakit ataupun gangguan fisik atau mental. Direktur urusan militer daerah harus melakukan pemeriksaan kembali kepada orang yang mendapat rating level 7.

Direktur urusan militer daerah kemudian menentukan klasifikasi kompetensi yang diperlukan dalam dinas militer sesuai jurusan kualifikasi lisensi bagi yang orang yang masuk dalam rating, level 1 sampai 4 dan masing-masing staf pertahanan militer memberikan bidang yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia.

Komponen cadangan merupakan komponen yang berasal dari sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Keberadaan komponen cadangan memungkinkan suatu negara untuk mengurangi anggaran militer pada masa damai dan disiapkan untuk perang. Sebagian negara memiliki komponen cadangan sebagai bagian sistem pertahanan negara. Secara umum fungsi komponen cadangan adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi.

Organisasi paramiliter dalam sistem pertahanan Negara Kolombia merupakan komponen cadangan yang memperkuat angkatan bersenjata Kolombia. Paramiliter adalah kelompokan penduduk sipil yang dilatih dan diorganisasikan secara militer. Organisasi paramiliter memiliki berbagai fungsi. Paramiliter bisa diwujudkan oleh pemerintah sebagai polisi paramiliter atau penjaga keamanan internal lain.

Penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara Kolombia, adalah melalui mobilisasi. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan

Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap Ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan bangsa dan Negara. Atau dengan kata lain Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

Komponen cadangan ditujukan untuk rakyat terlatih yang telah diberikan pembekalan atau pelatihan tentang bela negara yang merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan. Masyarakat sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia ditempatkan di bawah otoritas kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri yang dalam pengolahannya berada di tangan Presiden Kolombia.

Pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Kolombia.

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara hubungan kerjasama sipil - militer yang harmonis merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa karena berpengaruh terhadap ketahanan nasionalnya, bahkan menjadi prasyarat utama yang menentukan maju mundurnya suatu negara. Militer memerlukan dukungan pemerintah dalam hal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan angkatan perang dalam rangka mengatasi ancaman yang akan timbul. Begitu juga sipil membutuhkan militer sebagai perlindungan terhadap keamanan.

Kerjasama sipil militer dalam bidang pertahanan pada dasarnya dijabarkan dalam bentuk konsep sistem pertahanan menyeluruh. Konsep tersebut sebetulnya telah dijabarkan sejak lama dan para ilmuwan studi keamanan global menyebutnya sebagai total war. Salah satu perwujudan total war adalah melalui wajib militer yang biasanya diperlakukan di negara-negara yang memiliki potensi konflik dengan negara-negara terdekatnya.

Total war juga dapat berarti menggunakan seluruh kekuatan atau armada perang di seluruh matra, baik darat, udara dan laut untuk keperluan penyerangan/offensive. Dalam hal ini, Kolombia mengintegrasikan elemen-elemen negara, aparat keamanan, militer dan kekuatan masyarakat sipil untuk urusan pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan negara Kolombia dari ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan Kolombia dilakukan melalui pelatihan pra wajib militer dan pelatihan khusus pekerjaan militer. Pelatihan pra-wajib militer di Kolombia diadakan di lembaga-lembaga pendidikan. Pengetahuan dasar militer juga diajarkan kepada warga secara paralel dengan pelajaran sekolah mereka. Sementara itu Pelatihan khusus pekerjaan militer terhadap Warga negara yang telah mencapai usia 18 tahun dapat memperoleh pelatihan spesialisasi pekerjaan militer di lembaga pendidikan. Warga yang ingin mendapatkan pelatihan ini harus keluar dari pekerjaannya, tetapi mereka mendapatkan gaji setiap bulan tanpa bekerja selama masa pelatihan. Dan di akhir pelatihan mereka boleh kembali ke tempat kerja mereka.



Angkatan Bersenjata Kolombia

Pola pembinaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia telah ditetapkan menurut undang-undang Negara. Pemerintah Kolombia dapat memobilisasi rakyat untuk kepentingan pertahanan, dan rakyat diharuskan mengikuti wajib militer sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Kolombia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik berupa kekuatan, kelemahan, maupun peluang dan kendala. Jika kita menganalisa pola pembinaan dan kemampuan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia dengan menggunakan metode analisa SWOT maka dapat diketahui berbagai faktor baik yang merupakan kekuatan, kelemahan maupun faktor peluang dan kendala yang mempengaruhi penentuan kebijakan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kolombia. Analisa SWOT dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor ber-pengaruh agar didapat strategi terbaik dalam pemecahan persoalan.

Berikut adalah analisa SWOT yang disusun dalam bentuk *table* analisa SWOT : Kekuatan (*Strengths*) : Keberadaan masyarakat terlatih yang dapat diintegrasikan ke dalam pasukan paramiliter Kolombia. Kelemahan (*Weaknesses*) : Keterbatasan jumlah penduduk dan jumlah personel angkatan bersenjata. Peluang (*Opportunities*) : Dukungan dan bantuan dari Negara-negara. Ancaman (*Threats*) : Stabilitas politik yang belum stabil. Atas dasar tersebut strategi yang dapat digunakan adalah Strategi yang berbasis S-T, S-O, W-O dan W-T sebagai strategi yang paling efektif dalam meningkatkan pembangunan komponen cadangan dalam sistem pertahanan di negara Kolombia, yaitu : Strategi SO. Strategi Peningkatan kemampuan militer komponen cadangan. Strategi W-O. Strategi Peningkatan komponen cadangan melalui kerjasama dengan Negara lain. Strategi S-T. Strategi Peningkatan komponen cadangan melalui penerapan wajib militer. Strategi W-T. Strategi Peningkatan komponen cadangan dalam pengamanan dan penegakan hukum.

Saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan.

Dari data dan fakta serta analisis SWOT terkait pemberdayaan komponen cadangan Kolombia dihadapkan dengan kondisi daya tangkal bangsa Indonesia terhadap ancaman nonmiliter saat ini masihlah rentan dan kurang.



Angkatan Bersenjata Kolombia

Antara penerapan Wajib Militer dan penciptaan daya tangkal terhadap ancaman nonmiliter memiliki korelasi yang cukup signifikan. Wajib Militer sebagai bagian dari upaya penguatan komponen pertahanan militer memiliki pengaruh terhadap penguatan komponen pertahanan nirmiliter baik secara langsung maupun tidak langsung. Dihadapkan dengan hal tersebut, maka saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan antara lain : Pertama, TNI AD dapat memfokuskan pembangunan komponen cadangan yang berasal dari organisasi atau instansi selain dengan perekutan masyarakat umum. Untuk itu, pelatihan kemiliteran dasar dapat diberikan kepada instansi-instansi tertentu seperti pemadam kebakaran, Polri, Gegana, Bea Cukai/Imigrasi, Polhut, dan lain sebagainya; Kedua, Karena pembentukan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Negara Indonesia bersifat sukarela, maka TNI AD perlu menggiatkan pelaksanaan peningkatan kesadaran bela Negara terhadap generasi muda.



Angkatan Bersenjata Kolombia

Penutup

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dalam upaya pertahanan sebuah negara, masing-masing negara memiliki kekhasan dan strategi tersendiri dalam membangun kemampuan pertahanannya.

Komponen Cadangan menjadi pilihan yang rasional bila dikaitkan dengan konsep pertahanan negara yang bersifat semesta. Pembentukan Komcad dianggap dapat menampung aspirasi kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran untuk telibat dalam upaya bela negara. Kolombia merupakan salah satu negara yang menerapkan wajib militer guna memperkuat sistem pertahanan negara.

Di samping pelatihan militer, keterampilan lain di luar bidang militer juga dibutuhkan karena berbagai keterampilan juga sering kali berguna dalam dunia militer. Melalui penerapan Wajib Militer, mereka terbukti telah dapat menciptakan pertahanan militer yang cukup tangguh dan membentuk daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap ancaman yang ada baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Penerapan Wajib Militer yang dilakukan oleh negara Kolombia telah dapat menciptakan daya tangkal bagi bangsa tersebut. Efek tangkal yang diciptakan bagi ancaman militer sudah jelas karena dengan adanya Wajib Militer tentunya akan memperbesar postur pertahanan militer khususnya dalam kesiapan komponen cadangannya untuk memperkuat komponen utama.

Mengalir dari uraian tersebut diatas, maka diakhir penulisan ini, saran yang ingin disampaikan terkait dengan permasalahan komponen cadangan yaitu :

Pertama. Perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran bela Negara dari masyarakat Indonesia untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi komponen cadangan pertahanan;

Kedua. Pembentukan komponen cadangan perlu memperhatikan tingkat sebarannya dan hakekat ancaman pada suatu daerah.

**Major Cpl Arief Hernawan, S.T. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**





PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN PORTUGAL PASCA PENGHENTIAN PROGRAM WAJIB MILITER

Major Inf Billy Adriadi Pradita Iskandar

PENDAHULUAN

Portugal, secara resmi bernama Republik Portugis, adalah sebuah negara yang terletak di sepanjang pantai Atlantik Semenanjung Iberia di sebelah barat daya benua Eropa Daratan. Seringkali muncul pertanyaan di benak orang awam terkait apakah perbedaan antara Portugal dan Portugis. Sebenarnya Portugal dengan Portugis adalah sama, Portugal digunakan untuk menyebutkan nama negara sedangkan Portugis digunakan untuk menyebutkan orang, budaya, dan bahasa yang berasal dari Portugal. Portugal memiliki sejarah panjang dalam membangun peradaban baru yang lebih modern dan maju. Bersama dengan Spanyol, Portugal mempelopori kegiatan pelayaran jarak jauh mengelilingi dunia. Kedua bangsa tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Oleh karena itu, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas penting dan banyak dicari dalam perdagangan di Eropa.

Selain mencari rempah-rempah, ekspedisi juga dilakukan untuk mencari daerah jajahan yang baru yang membuat Portugal tampil sebagai kekuatan besar dunia dengan memiliki

daerah jajahan di wilayah Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. Saat ini, Portugal dapat digolongkan sebagai salah satu negara maju di dunia dengan banyak keunggulan di berbagai bidang termasuk pertahanan. Di bidang pertahanan, Portugal masuk dalam jajaran elit dunia dimana negara Portugal adalah salah satu dari 14 negara pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kondisi dalam negeri juga relatif sangat stabil dan aman, bahkan Portugal menduduki peringkat ke-3 negara paling damai di dunia versi Global Peace Index tahun 2020. Konflik dalam negeri yang terakhir kali terjadi di Portugal adalah saat terjadinya Revolusi Anyelir yang dimulai pada bulan Februari 1974 ketika Tentara Angkatan Bersenjata yang berseberangan dengan pemerintah mulai melaksanakan serangkaian pergerakan untuk menggulingkan rezim Estado Novo pimpinan Marcello Caetano yang diktator dan represif. Kudeta yang dipimpin oleh Vitor Alves, Otelo Saraiva de Carvalho, dan Kapten Vasco Lourenco ini dilaksanakan secara damai yang ditandai dengan pemasangan bunga anyelir di ujung laras-laras pasukan bersenjata selama demonstrasi. Aksi damai dengan cepat segera mendapat dukungan dari sebagian besar warga Portugal.

PORUGAL



Peta Wilayah Negara Portugal

Puncaknya, pada tanggal 25 April 1974 Angkatan Bersenjata Gerakan (MFA) memberitahukan bahwa revolusi telah dimulai dan tidak akan dihentikan. Aktivitas kudeta tersebut akhirnya sampai pada tahap akhir ketika pada siang harinya, para anggota MFA mengepung markas polisi militer tempat PM Caetano bersembunyi dan memaksanya menyerahkan jabatan kepada Jenderal Spinola. Enam jam kemudian, rezim Caetano mengalah. Kudeta yang dipimpin oleh militer ini berhasil mengembalikan demokrasi kepada Portugal dan mengganti rezim otoriter menjadi demokrasi.

Tepat setelah Caetano setuju untuk menyerahkan jabatannya, Revolusi Anyelir pun berakhir hanya dalam waktu sehari dengan kemenangan kubu MFA dan nyaris tanpa korban jiwa. Setelah peristiwa tersebut, kondisi keamanan dalam negeri relatif stabil sampai hari ini.



Peta Wilayah Negara Portugal

Saat ini, fokus pertahanan Portugal adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pasukan militernya untuk mampu berkontribusi lebih banyak dalam tugas-tugas internasional. Dalam konsep strategi pertahanan Portugal, sistem pertahanan secara defensif telah direvisi menjadi kontribusi ofensif dengan menggeser medan pertempuran dari dalam negeri keluar. Meskipun angkatan bersenjata Portugal sebagai komponen utama pertahanan sudah sangat mapan, namun penyiapan komponen cadangan masih sangat perlu untuk dilakukan di Portugal. Program wajib militer pernah diterapkan di Portugal, namun setelah melalui evaluasi dan pertimbangan akhirnya program ini dihentikan pada tahun 2004.



Angkatan Bersenjata Portugal

Dari uraian di atas, terdapat beberapa pokok-pokok persoalan yang perlu dianalisis untuk diperoleh jawaban yaitu : Pertama, Bagaimana sejarah singkat angkatan bersenjata negara Portugal terkait dengan komponen cadangan? Kedua, Bagaimanakah sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Portugal? Ketiga, Bagaimanakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Portugal, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negeri tersebut? Keempat, Bagaimanakah pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Portugal? Dan Kelima, Apa saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan tersebut? Dari beberapa persoalan diatas, maka didapatkan rumusan judul esai "Pembinaan Komponen Cadangan

Pertahanan Portugal Pasca Penghentian Program Wajib Militer". Memperjelas pembahasan, dalam esai ini akan dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembinaan komponen cadangan yang ada di negara Portugal.

Dalam penulisan esai ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengamati permasalahan yang terjadi dengan menganalisis berbagai data dan fakta yang ada. Penulisan esai ini didukung dengan pendekatan studi kepustakaan dalam menggali informasi yang diperlukan. Adapun pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui sejarah singkat angkatan bersenjata Portugal, sistem rekrutmen komponen cadangan, organisasi dan penggunaan komponen cadangan, serta pola pembinaan dan pemeliharaan komponen cadangan untuk pertahanan negara. Penulisan esai ini disusun dengan tata urut meliputi Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup..

PEMBAHASAN.

Portugal pernah menerapkan kebijakan wajib militer. Layanan militer adalah wajib bagi warga negara laki-laki sampai tahun 2004. Antara tahun 2000 dan 2004, Portugal melewati masa transisi, pada akhirnya pada tahun 2004 pemerintah memutuskan bahwa program wajib militer berakhir. Militer selanjutnya akan diisi oleh prajurit profesional yang direkrut dengan sistem sukarela untuk karir penuh atau kontrak bagi personel yang karena keahliannya dibutuhkan oleh militer. Namun demikian, dalam kasus kebutuhan yang ekstrim, warga negara – baik pria maupun wanita – dapat dipanggil untuk melayani sebagai wajib militer. Selain terus memodernisasi angkatan bersenjatanya, Portugal juga menyiapkan komponen cadangan meskipun program wajib militer telah dihentikan.

Latar Belakang Angkatan Bersenjata dan Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Portugal.

Dalam konstitusi negara Portugal, Pertahanan nasional didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menjamin

kedaulatan Negara, kemerdekaan nasional dan integritas wilayah Portugal, serta untuk menjamin kebebasan dan keamanan penduduk dan perlindungan nilai-nilai dasar tatanan konstitusional terhadap setiap ancaman atau agresi eksternal. Pertahanan negara juga menjamin terpenuhinya perjanjian-perjanjian militer internasional Negara, sesuai dengan kepentingan nasional.

Angkatan Bersenjata Portugis (*Forcas Armadas*) bertanggung jawab atas pertahanan militer, yang merupakan komponen militer dari pertahanan nasional. Dalam Undang-undang Pemrograman Militer (*Lei de Programação Militar, LPM*), fokus pemerintah saat ini adalah menetapkan program investasi publik untuk Angkatan Bersenjata dalam hal persenjataan dan peralatan, untuk modernisasi dan operasionalisasi sistem kekuatan, melalui pembangunan kapasitas mereka. Hal ini memungkinkan partisipasi publik dalam sistem pertahanan negara.

Di masa lalu, antara tahun 2000 – 2004 Portugal memang pernah menerapkan program wajib militer untuk membantu militer dalam masa transisi setelah adanya pengembangan organisasi dan layanan militer. Sejalan dengan trend global saat itu, Forcas Armadas mengembangkan organisasinya dengan fokus membantu negara dalam menghadapi ancaman teroris global, perdagangan narkoba internasional, dan ancaman masuknya pengungsi dari wilayah konflik di Afrika dan Timur Tengah. Wajib militer ini juga digunakan untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk yang terdampak depresi ekonomi pada tahun-tahun itu. Selain itu, program ini juga untuk menarik minat generasi muda untuk mau bergabung menjadi tentara. Seiring dengan penurunan potensi ancaman dan membaiknya kondisi perekonomian negara, maka program ini dihentikan. Terhitung sejak 19 November 2004 layanan militer di Forcas Armadas sepenuhnya dilakukan oleh militer aktif.

Sistem Rekrutmen Komponen Cadangan Pertahanan Portugal.

Pasca pencabutan kebijakan wajib militer bagi warga negaranya, pembinaan komponen

cadangan Portugal dilakukan dengan cara yang lebih modern. Partisipasi publik dalam pertahanan tetap diberikan ruang namun pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Portugal membuka layanan terhadap militer kepada sipil dengan dua skema. Skema pertama adalah ajakan untuk bergabung dengan layanan militer secara sukarela dengan mengikuti pelatihan dan selanjutnya akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi militer profesional. Sedangkan skema yang kedua adalah dengan mengajukan layanan militer dengan sistem kontrak yang diutamakan kepada warga negara yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh militer seperti kemampuan di bidang medis, mekanis, IT, bahasa asing, dan administrasi publik. Setelah disahkannya UU nomor 7 tahun 2015 tentang Pemrogaman Militer, publik diundang bergabung militer diarahkan pada adanya investasi bagi pengembangan teknologi militer dan industri militer. Saat ini Portugal sedang gencar melakukan kampanye untuk kemandirian pertahanan dengan penggunaan alutsista produksi dalam negeri. Sehingga partisipasi publik dalam pertahanan tidak hanya diberikan melalui sumbangan tenaga dan pemikiran namun juga dana untuk investasi. Meskipun negara sudah tidak lagi menerapkan kewajiban militer, namun konstitusi mensyaratkan bahwa dalam keadaan darurat ekstrim yang dinyatakan oleh pemerintah dan disetujui oleh legislatif, seluruh warga negara laki-laki dan perempuan dapat dimobilisasi untuk membantu layanan militer. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Central Intelligence of America*, pada tahun 2010 Portugal memiliki potensi warga negara yang eligible untuk komponen cadangan di dinas militer dengan jumlah 2.103.080 laki-laki (usia 18–35 tahun) dan 2.018.004 perempuan, (usia 18–35 tahun)⁸. Ini dapat digunakan untuk memperkuat militer Portugal yang saat ini berjumlah 32.992 orang militer aktif.

Bentuk Organisasi dan Penggunaan Komponen Cadangan dalam Pertahanan Negara Portugal.

Pada saat masih diberlakunya wajib militer, pasukan komponen cadangan

diarahkan untuk terlibat dalam organisasi yang baru dikembangkan oleh militer terutama yang berkaitan dalam operasi perbantuan. Organisasi yang baru dikembangkan memiliki tugas untuk bersinergi dengan unsur lembaga negara lain dalam penanganan bahaaya terorisme, perdagangan gelap narkoba, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana. Tugas-tugas tersebut membutuhkan peran militer namun di satu sisi jumlah militer aktif di Forcas Armadas sangat terbatas. Namun setelah organisasi baru tersebut mulai mapan dan mampu berdiri sendiri, secara perlahan perkuatan personel mulai dikurangi dan ditarik.

Pada saat ini, organisasi yang paling mungkin untuk dikategorikan sebagai organisasi komponen cadangan adalah pasukan Garda Republik Nasional. Garda Republik Nasional adalah korps pasukan khusus yang memiliki ciri khusus sebagai kekuatan militer yang bukan bagian dari Forcas Armadas. Ini adalah pasukan keamanan jenis gendarmerie⁹, yang terdiri dari sekitar 26.000 personel militer, yang merupakan bagian dari sistem keamanan internal. GRN bertanggung jawab untuk kepolisian preventif dari sebagian besar daerah pedesaan negara, pelaksanaan patroli dari jalan raya utama, penegakan adat dan kontrol pesisir. GRN juga melakukan beberapa misi khusus seperti penyediaan pengawal kehormatan negara upacara militer, keamanan istana Presiden, perlindungan lingkungan, penyelamatan dan pemadam kebakaran hutan. Dalam masa damai, GNR berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meskipun bukan bagian dari Angkatan Bersenjata, GNR dapat ditempatkan di bawah komando operasional Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang mengatur Pertahanan Negara, Angkatan Bersenjata, keadaan pengepungan dan yang keadaan darurat . Dalam lingkup misi militernya, GNR secara khusus disesuaikan untuk pemenuhan operasi militer selain perang.

Pola Pembinaan dan Pemeliharaan Kemampuan Komponen Cadangan Negara Portugal.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh

pemerintah Portugal untuk komponen cadangan dilaksanakan dengan standar NATO dimana setiap negara warga dilatih dan diberikan pelajaran mengenai disiplin nasional dan cinta tanah air. Walaupun tidak dilaksanakan program wajib militer, namun nasionalisme warga negara Portugal tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri memberikan kepercayaan atas legitimasi terhadap rezim yang sedang berkuasa.

Dalam rancangan konsep pengembangan kekuatan pertahanan di masa mendatang, Portugal bertekad untuk memodernisasi alutsista untuk mendukung tugas-tugas militer yang saat ini lebih banyak digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas penjaga perdamaian sesuai mandat dari PBB maupun NATO. Dalam program tersebut, negara memerlukan anggaran belanja yang tidak sedikit. Dari kondisi itu, peran serta warga negara sebagai komponen cadangan diarahkan untuk berpartisipasi dalam investasi pengembangan teknologi dan industri militer.

Dari uraian penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pola pembinaan dan pemeliharaan komponen cadangan di Portugal relatif berbeda dengan negara lain. Forcas Armadas menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai militer profesional sehingga menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Portugal. Negara menjamin keselamatan rakyatnya serta berusaha mengkomunikasikan kepentingan nasional dengan para pemangku kepentingan sehingga loyalitas dan rasa cinta tanah air dari rakyat kepada negara dapat ditumbuhkan tanpa harus melalui pelaksanaan program wajib militer.

Dari data dan fakta tersebut, dapat dilakukan analis dengan metode SWOT tentang pembinaan komponen cadangan yang dilakukan oleh negara Portugal pasca penghentian program wajib militer untuk mengetahui seberapa efektif upaya tersebut bagi pertahanan negara Portugal. Analisis SWOT akan menilai semua faktor yang berpengaruh dalam proses pembinaan komponen cadangan.

Apabila faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dimasukkan ke dalam tabel analisis SWOT akan diperoleh data sebagai berikut :

STRENGTH	WEAKNESS
<ul style="list-style-type: none"> - kondisi keamanan yang sangat baik - anggaran militer yang besar - ketabilan situasi politik negara - tergolong sebagai negara maju - ekonomi negara yang kuat 	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah tentara sedikit - alutsista belum semua modern
OPPORTUNITY	THREAT
<ul style="list-style-type: none"> - mendapat dukungan dari rakyat - mendapat dukungan dari NATO - negara mendukung pembangunan pertahanan - hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain 	<ul style="list-style-type: none"> - ketergantungan pada bantuan asing - industri pertahanan belum mandiri

Secara singkat, analisis dari tiap-tiap kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kuadran I : Negara memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat dikerahkan untuk mendapatkan kemajuan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah agresif untuk mencapai keunggulan.

Kuadran II : Negara menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah memilih strategi diversifikasi yaitu dengan menyiapkan beberapa strategi secara pragmatis untuk mengurangi ancaman dan meningkatkan potensi kekuatan internal.

Kuadran III : Negara memiliki peluang yang sangat besar namun masih mempunyai banyak kelemahan secara internal. Strategi yang dapat diambil adalah turn around yaitu dengan meninjau kebijakan untuk merebut peluang dari luar sambil terus berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan baik.

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, negara menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang digunakan yakni bertahan untuk meminimalisir kelemahan sekaligus menghindari ancaman.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dalam pembinaan komponen cadangan untuk pertahanan di negara Portugal, strategi yang perlu diambil adalah strategi SO karena Portugal memiliki lebih banyak kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk terus bergerak maju secara agresif dalam membangun pertahanan dan komponen cadangan yang dimiliki.



Angkatan Bersenjata Portugal

Kekuatan secara internal yang dapat dikembangkan antara lain adalah kondisi keamanan yang sangat baik, besarnya alokasi anggaran militer (*military expenditure*) yang diberikan oleh negara, situasi politik negara yang demokratis sehingga jalannya pemerintahan dapat dikelola dengan stabil dan tidak memiliki konflik, posisi Portugal yang tergolong sebagai negara maju dengan tingkat disiplin dan kesadaran masyarakatnya yang tinggi, serta kondisi perekonomian negara yang kuat adalah kekuatan-kekuatan yang dapat dikembangkan untuk mendukung penguatan *Forcas Armadas* dan pertahanan Portugal.

Selain itu, secara eksternal Portugal juga memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pencapaian strategi pertahanannya berupa dukungan dari rakyat dan keterlibatannya dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa.

Saran dan Masukan bagi TNI AD dalam Pembinaan Komponen Cadangan.

Adapun belajar dari konsep pembinaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Portugal, maka saran dan masukan bagi TNI AD dalam pembinaan komponen cadangan antara lain :

Pertama, untuk membangun kekuatan pertahanan, angkatan bersenjata harus mampu menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya terlebih dahulu untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat;

Kedua, pembangunan komponen cadangan untuk pertahanan tidak harus dilakukan dengan pelaksanaan program wajib militer, namun loyalitas dan kesiapan rakyat dalam mendukung pertahanan negara dapat ditunjukkan melalui kedisiplinan dan ketiaatan warga terhadap pemerintah; dan

Ketiga, pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan sebagai kunci utama dalam memperkuat sistem pertahanan negara dapat dilakukan dengan membuka partisipasi publik dalam pembangunan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.

PENUTUP

Dari esai di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan komponen cadangan yang dilakukan oleh negara Portugal pasca penghentian program wajib militer sudah dilakukan dengan sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh pemerintah Portugal.

Pemerintahan yang stabil, perekonomian yang kuat, dan didukung oleh peran publik dalam pertahanan adalah sebagian kekuatan internal yang dapat dikembangkan. Selain itu, posisi Portugal sebagai anggota NATO dan hubungan yang baik dengan semua negara memberikan peluang eksternal bagi Portugal untuk memperkuat sistem pertahanan dan komponen cadangan yang dimiliki.

Major Inf Billy Adriadi Pradita Iskandar adalah Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021





PERAN NEGARA DENMARK DALAM MENCiptakan Komponen Cadangan Dalam Rangka Pertahanan Negara

Major Inf Darmawan Hendra Wijaya

PENDAHULUAN

Denmark adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di Semenanjung Skandinavia. Denmark berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973, tetapi sampai sekarang masih belum bergabung dalam Eurozone. Denmark merupakan salah satu pendiri NATO dan OECD serta anggota dari OSCE, Denmark menganut Konsep Pertahanan Total dalam sistem pertahanan negaranya mencakup pemanfaatan semua sumber daya untuk mempertahankan masyarakat yang terorganisir dan fungsional serta untuk melindungi penduduk dan aset nasional. Ancaman-ancaman yang harus dilawan dengan pertahanan total melintasi batas-batas negara dan domain administratif domestik dari berbagai otoritas publik menuntut solusi bersama dan koordinasi yang erat di antara otoritas internasional dan nasional.

Mencermati hal tersebut di atas, maka penulis menguraikan identifikasi masalah yang Pertama, Bagaimana sejarah singkat angkatan bersenjata negara Denmark terkait dengan komponen cadangan? Kedua, Bagaimakah sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Denmark?

Ketiga, Bagaimakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Denmark, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara Denmark? Keempat, Bagaimakah pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Denmark? Selanjutnya Penulis memilih angkatan bersenjata Denmark sebagai salah satu bahasan terhadap sistem pertahanan negara. Adapun dalam penulisan esai ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis didasarkan pada pendekatan studi perpustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang ada.

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan nilai guna pribadi berupa pengalaman menganalisa permasalahan dalam perspektif akademis dan diharapkan bisa menambah referensi pembahasan terkait Peran negara Denmark dalam menciptakan komponen cadangan dalam rangka pertahanan negara.

Selanjutnya penulis bermaksud memberikan gambaran tentang Peran negara Denmark dalam menciptakan komponen cadangan dalam rangka pertahanan negara serta *lesson learned* yang dapat diambil dari tulisan

tersebut berupa saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan. Adapun tujuannya adalah sebagai sumbangsih pemikiran sebagai sarana untuk menambah wawasan. Ruang lingkup pembahasan esai ini dibatasi pada variabel- variabel yang berkaitan dengan Peran negara Denmark dalam menciptakan komponen cadangan dalam rangka pertahanan negara.

Pembahasan.

Kekuatan Pertahanan Negara Denmark adalah angkatan bersenjata terpadu Kerajaan Denmark yang bertugas membela Denmark dan konstituennya, negara-negara berpemerintahan sendiri *Greenland* dan Kepulauan *Faroe*. Pertahanan juga mempromosikan kepentingan Denmark yang lebih luas mendukung upaya penjaga perdamaian internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan. Sejak pembentukan militer tetap pada tahun 1510, angkatan bersenjata telah melihat aksi dalam banyak perang, sebagian besar melibatkan Swedia, tetapi juga melibatkan kekuatan besar dunia, termasuk Perang Tiga Puluh Tahun, Perang Utara Besar, dan Perang Napoleon.



Peta Wilayah Negara Denmark

Saat ini, Pertahanan Denmark terdiri dari: Angkatan Darat Kerajaan Denmark, cabang utama perang darat Denmark; Angkatan Laut Kerajaan Denmark, angkatan laut air biru dengan armada 20 kapal yang ditugaskan; dan Angkatan Udara Kerajaan Denmark, angkatan udara dengan armada operasional yang terdiri dari pesawat sayap tetap dan pesawat putar.

Pertahanan juga termasuk *Home Guard*. Di bawah Undang-Undang Pertahanan Denmark Menteri Pertahanan berfungsi sebagai komandan Pertahanan Denmark (melalui Kepala Pertahanan dan Komando Pertahanan) dan Pengawal Dalam Negeri Denmark (melalui Komando Penjaga Dalam Negeri).

Sejarah singkat Angkatan Bersenjata Negara Denmark terkait komponen cadangan.

Pada akhir Perang Dingin Angkatan Bersenjata Denmark memiliki unit militer yang berada di bawah Komando Gabungan NATO Jerman Barat/Denmark, *Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP)*. *BALTAP* adalah komando bawahan utama di bawah Komando Pasukan Sekutu Eropa Utara (AFNORTH). Panglima Tertinggi (*BALTAP*) berpangkat Letnan Jenderal atau Wakil Laksamana Denmark, yang memiliki sebutan *Commander Allied Forces Baltic Approaches (COMBALTAP)*.

Di masa damai, *BALTAP* hanya memiliki beberapa unit komunikasi yang dialokasikan dan semua unit lainnya tetap berada di bawah komando nasional Bundeswehr Jerman Barat dan Forsvaret Denmark yang terdiri dari Angkatan Darat Kerajaan Denmark, Angkatan Laut Kerajaan Denmark, Angkatan Udara Kerajaan Denmark, Danish Home Guard atau Komponen pendukung Denmark. Terkait dengan Wajib militer, Denmark telah mengaplikasikan kegiatan tersebut sejak Zaman Viking, di mana satu pemuda dengan fisik yang prima diminta untuk melayani raja Frederick IV dari Denmark pada tahun 1710.

Pada 12 Februari 1849, semua pria yang sehat secara fisik diwajibkan untuk mengikuti wajib militer sesuai Konstitusi Denmark. pada tahun 2024. Jumlah wajib militer yang dipanggil setiap tahun adalah sekitar 4.200; tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ini sekitar 500 per tahun.



Angkatan Bersenjata Denmark

Pelatihan dasar berlangsung selama empat bulan; setelah wajib militer akan menerima pelatihan militer lanjutan. Cadangan terdiri dari sekitar 2.500 personel dan sebagai konsekuensi dari Perjanjian Pertahanan, ini dapat ditingkatkan sekitar 600 personel pada tahun 2023. Para personel cadangan dipanggil selama tujuh hingga empat belas hari pelatihan setiap tahunnya. Kekuatan keseluruhan *Home Guard (HG)* adalah sekitar 550 pekerja permanen, 15.000 sukarelawan di struktur aktif, dan 30.000 di struktur cadangan. HG digunakan untuk mendukung layanan militer dan sipil, dan juga memiliki peran dalam penerimaan dan perlindungan pasukan penguat Sekutu, dan untuk perlindungan infrastruktur. Personil HG juga digunakan sebagai augmentee individu atau peleton dalam operasi dan misi internasional, dan keterlibatan pengembangan kapasitas pertahanan.

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan

Total *forsvaret* atau Pertahanan Total adalah "Penggunaan seluruh sumber daya untuk mempertahankan masyarakat yang terorganisir dan fungsional, dan untuk melindungi populasi dan nilai-nilai masyarakat". Hal ini dicapai dengan menggabungkan militer, *Home Guard*, Badan Manajemen Darurat Denmark dan unsur-unsur kepolisian. Konsep pertahanan total diciptakan setelah Perang Dunia II, di mana pertahanan negara tidak hanya dapat mengandalkan militer, tetapi juga perlu ada langkah-langkah lain untuk memastikan kelangsungan masyarakat. Sebagai bagian dari Pertahanan Total, seluruh mantan wajib militer dapat dipanggil kembali untuk bertugas, dalam keadaan darurat.

Menurut Konstitusi Denmark, setiap pria dewasa Denmark harus menyelesaikan wajib militer. Dan bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pertahanan negaranya sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setelah melaksanakan Pendidikan Dasar Keprajuritan, Personel Wajib militer bertugas di Angkatan bersenjata Denmark mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara selama 4 bulan kecuali Wajib militer dari Resimen Penjaga Hussar Mounted Squadron, yang melayani 12 bulan, Wajib militer *Cyber* melayani selama 10 bulan., Wajib militer di *Royal Yacht Dannebrog*, yang bertugas selama 9 bulan. Wajib militer di Badan Penanggulangan Darurat Denmark, yang bertugas selama 9 bulan, Wajib militer di Royal Life Guards bertugas selama 8 bulan. Selain itu, personel wajib militer dikerahkan untuk bertugas minimal enam bulan di posisi non-militer, misalnya di Beredskabsstyrelsen yaitu Badan pemerintahan yang menangani bencana non-militer seperti kebakaran, banjir, polusi, dan sebagainya maupun penugasan di negara dunia ketiga.

Kekuatan angkatan bersenjata Denmark pada akhir 2013 adalah sekitar 17.500 personel militer, termasuk wajib militer, yang diperkirakan sekitar 5.300 warga sipil. Berdasarkan Perjanjian Pertahanan 2013-2017, jumlah personel militer tidak ada penambahan, pada tingkat ini, jumlah warga sipil akan berkurang menjadi sekitar 4.800 pada akhir tahun 2017. Meskipun perekrutan armada secara umum menjadi masalah, angkatan bersenjata masih memiliki kekurangan. di tingkat NCO dan di spesialis EOD dan LED. Perjanjian Pertahanan menegaskan kembali prinsip konsorsium hingga 2020 dan 4.200 wajib militer akan terus dipanggil setiap tahun.

Pada akhir tahun 2017, kekuatan Angkatan Bersenjata Denmark adalah sekitar 16.700 personel militer, termasuk wajib militer, didukung oleh sekitar 4.700 warga sipil. Sebagai bagian dari Perjanjian Pertahanan, Angkatan Bersenjata Denmark akan mengatur ulang dan mengurangi staf yang lebih tinggi untuk memfokuskan kembali sumber daya personel pada kemampuan operasional. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan struktur kekuatan operasional sekitar 1.450 personel.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara.

Kementerian Pertahanan terdiri dari departemen dan sejumlah otoritas instansi. Departemen tersebut adalah Sekretariat Menteri. Bidang utama pekerjaan departemen adalah tugas - tugas yang bersifat politik dan

pengelolaan bidang kementerian. Kesamaan untuk semua lembaga adalah, bahwa mereka terutama terlibat dengan tugas-tugas mengenai keamanan dan manajemen darurat. Badan terbesar adalah Komando Pertahanan, yang bersama-sama dengan Komando Pengawal Dalam Negeri, adalah pertahanan Denmark yang dikumpulkan. Dinas Intelijen Pertahanan adalah dinas intelijen asing Denmark dan pada saat yang sama dinas intelijen militer Denmark.

Kementerian Pertahanan juga memiliki tugas dan badan sipil. Administrasi Keselamatan Maritim bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan navigasi di perairan Denmark. Badan Manajemen Darurat bertanggung jawab atas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nasional Denmark.

Conscientious Objectors Administration menangani anggota militer yang melakukan pelanggaran dalam dinas militer Denmark. Korps Jaksa Agung Hakim adalah jaksa internal untuk pembela Denmark. Audit Internal Pertahanan bekerja sama dengan Kantor Audit Nasional Denmark mengenai semua audit di Kementerian Pertahanan Denmark. Untuk personel institusi diluar militer diatas merupakan personel wajib militer yang tidak melanjutkan bidang karier di militer namun diarahkan kepada badan sipil dibawah kementerian pertahanan Denmark antara lain Administrasi Keselamatan Maritim, Badan Manajemen Darurat atau Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penyelamatan Nasional Denmark dan *Conscientious Objectors Administration*/Departemen Kehakiman.

Pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan

Pertahanan total mencakup pemanfaatan semua sumber daya untuk mempertahankan masyarakat yang terorganisir dan fungsional serta untuk melindungi penduduk dan aset nasional. Ancaman-ancaman yang harus dilawan dengan pertahanan total melintasi batas-batas negara dan domain administratif domestik dari berbagai otoritas publik menuntut solusi bersama dan koordinasi yang

erat di antara otoritas internasional dan nasional. Salah satu manfaat bagi masyarakat Denmark, dari pelatihan wajib militer Pertahanan Denmark sebelumnya untuk kekuatan tempur berbasis mobilisasi, adalah bahwa banyak orang dilatih sebagai wajib militer dalam beberapa disiplin ilmu yang kini menjadi semakin relevan.

Hal ini berlaku untuk bidang-bidang seperti pengawasan, pertolongan pertama, tanggap darurat dan tindakan pertahanan untuk melawan senjata atom, biologi dan kimia, dll. Dalam situasi saat ini, bagian lain dari pelatihan wajib militer konvensional untuk pertahanan territorial telah kehilangan banyak relevansinya, tetapi personel masih diperlukan untuk memungkinkan Pertahanan Denmark berkontribusi pada pertahanan total. Oleh karena itu, wajib militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Konstitusi Denmark, harus disesuaikan.



Angkatan Bersenjata Denmark

Di sisi lain, pertahanan total akan diperkuat semaksimal mungkin dengan integrasi upaya tanggap darurat nasional dan Pertahanan Denmark, dalam struktur yang menjamin sinergi dan penyederhanaan. Home Guard diintegrasikan ke dalam struktur operasional dan pendukung Pertahanan Denmark - tanpa mengorbankan identitasnya. Selain itu, pertahanan total harus didukung dengan membentuk kekuatan pertahanan total yang terdiri dari sekitar 12.000 tentara yang telah menyelesaikan program pelatihan 700 jam yang relevan selama periode empat bulan.

Dalam tiga tahun pertama setelah selesainya program pelatihan militer gabungan awal, pasukan ini akan berada di tangan Pertahanan Denmark untuk melakukan tugas-tugas pertahanan total bagi komunitas Denmark, dengan ketentuan bahwa kemampuan pasukan tetap Pertahanan Denmark, keadaan darurat nasional upaya manajemen dan *Home Guard* tidak mencukupi. Dengan demikian, kekuatan pertahanan total memastikan bahwa Denmark memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan ancaman terhadap negara dan untuk menangani bencana skala besar.



Angkatan Bersenjata Denmark

Penutup.

Kesimpulan. Forsvaret Denmark yang terdiri dari Angkatan Darat Kerajaan Denmark, Angkatan Laut Kerajaan Denmark, Angkatan Udara Kerajaan Denmark, Danish Home Guard atau Komponen pendukung Denmark. Terkait dengan Wajib militer, Denmark telah mengaplikasikan kegiatan tersebut sejak Zaman Viking, di mana satu pemuda dengan fisik yang prima diminta untuk melayani raja Frederick IV dari Denmark pada tahun 1710.

Menurut Konstitusi Denmark, Sistem rekrutmen dalam rangka penerimaan Komponen cadangan adalah setiap pria dewasa Denmark berumur 18 Tahun harus menyelesaikan wajib militer. Dan bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pertahanan negaranya sesuai yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Komponen pendukung dan Wajib Militer berada dibawah Kementerian Pertahanan yang menangani Badan Instansi Militer dan Intansi Otoritas Sipil berasal dari personel wajib militer yang tidak melanjutkan peluang karir di militer. Salah satu manfaat bagi masyarakat Denmark, dari pelatihan wajib militer Pertahanan Denmark sebelumnya untuk kekuatan tempur berbasis mobilisasi, adalah bahwa banyak orang dilatih sebagai wajib militer dalam beberapa disiplin ilmu yang kini menjadi semakin relevan.

Pelajaran yang dapat dipetik (lesson learned) dari sudut pandang Komponen Cadangan negara Denmark adalah bahwa dengan pembentukan komponen cadangan, setiap warga negara selain dapat dikerahkan di Institusi militer dalam karir lanjutan, dapat dikerahkan dalam unsur otoritas sipil dibawah kementerian pertahannya jika negara dalam keadaan bahaya. Jika dikaitkan dengan keadaan yang ada di Indonesia bahwa unsur komponen cadangan dapat dikerahkan dalam BNPB, Bakamla, Keselamatan Penerbangan, dan Kementerian Kehakiman sesuai dengan keahlian dasar yang dimilikinya.

**Major Inf Darmawan Hendra Wijaya
adalah Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**





PERAN DAN PENGGUNAAN RESERVE PERSONNEL (KOMPONEN CADANGAN) DALAM SISTEM PERTAHANAN REPUBLIK SIRIUS

Major Inf Acuk Andrianto, S.E.

PENDAHULUAN

Republik Siprus adalah negara yang berada di laut tengah (*Mediterranean Sea*) yang mengumumkan kemerdekaannya secara resmi pada 16 Agustus 1960, namun dirayakan setiap tahunnya pada 1 Oktober sebagai hari kemerdekaan. Negara ini merupakan sebuah pulau dengan Luas wilayahnya adalah 9.250 km persegi. Nama resmi Siprus adalah "Republik Siprus".¹ Nama itu dieja sebagai *Kypros* dalam bahasa Yunani, dan *Kibris* dalam bahasa Turki. Siprus juga dikenal sebagai "Pulau Aphrodite" (*Venus*), dewi cinta Yunani kuno. Ibukota Siprus yang merupakan kota terbesar di negara ini adalah Nicosia (Lefkosia).

Namun terdapat beberapa kota utama lainnya di Siprus termasuk Limassol (Lemesos), Paphos (Pafos), Larnaca, Famagusta, Kyrenia, Polis, Trodos, Paralimni, Kakopetria dan Agia Napa. Siprus kaya akan situs bersejarah dan peninggalan arkeologi, seperti tembok benteng di Nicosia dan Famagusta, Petra tou Romiou (tempat kelahiran Aphrodite) di Pafos, kota kuno Choirokoitia, Makam Para Raja di Pafos, biara Agia Napa, gereja Angeloktisti di Kiti, teater Romawi di Kourion dan Salamis. Populasi Siprus adalah sekitar 1,1 juta (dengan banyak Siprus yang tinggal di luar negeri, terutama di Inggris, Amerika Serikat dan Australia).

Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Yunani, Turki, dan Inggris. Siprus menjadi anggota Uni Eropa (UE) pada 1 Mei 2004. Dengan penduduk yang di dominasi dengan dua suku terbesar yaitu Siprus Yunani dan Siprus Turki, negara ini mempunyai potensi konflik yang sangat besar dikarenakan dua perbedaan yang mendasar baik dari tradisi, sejarah, kebudayaan, makanan maupun agamanya, dimana Siprus Yunani berkembang dengan pengaruh yang besar dari kebudayaan Romawi dengan agama Kristen ortodoks dilain pihak Siprus Turki lebih dominan dipengaruhi oleh kebudayaan Turki Utsmani dengan agama Islam Sunni.

Dari latar belakang negara Siprus diatas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang dapat dijadikan tambahan informasi dan pelajaran bagi kita, bangsa dan negara Indonesia khususnya TNI AD, antara lain : Pertama, Bagaimana sejarah singkat Angkatan bersenjata Republik Siprus terkait dengan komponen cadangan, Kedua, Bagaimanakah sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di Republik Siprus, Ketiga, Bagaimanakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Siprus, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman

dari luar negara serta Bagaimana saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan tersebut.



Peta Wilayah Negara Republik Siprus

Melalui esai ini penulis ingin menjelaskan/menginformasikan serta memperkenalkan pembaca tentang komponen cadangan dari Republik Siprus sebagai tambahan pengetahuan. Dalam esai ini penulis akan membahas mengenai Peran Dan Penggunaan Reserve Personnel (Komponen Cadangan) dalam Sistem Pertahanan Republik Siprus. Adapun metoda penulisan yang digunakan dalam esai ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan fakta yang relevan dengan persoalan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan. Nilai guna dari penulisan esai ini adalah memberikan pemahaman tentang tentang sistem komponen cadangan negara siprus sehingga dapat menjadi pembanding dan masukan yang bermanfaat bagi TNI dalam menerapkan sistem komponen cadangan di Indonesia. Tulisan ini untuk memberikan gambaran penerapan komponen cadangan negara lain, yaitu Republik Siprus dalam mempersiapkan tenaga bantuan bagi Angkatan bersenjatanya (*Garda Nasional Siprus*).

Pembahasan

Pada pembahasan ini, akan diuraikan tentang peran reserve personnel (komponen cadangan) Garda Nasional (Angkatan Perang)

Republik Siprus dengan menguraikan beberapa persoalan antara lain : sejarah singkat tentang Garda Nasional Republik Siprus terkait dengan komponen cadangan, sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di Republik Siprus, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Siprus, terutama Ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara.

Sejarah singkat Angkatan bersenjata Republik Siprus terkait dengan komponen cadangan

Garda Nasional Siprus adalah kekuatan militer atau nama Angkatan Perang resmi Republik Siprus. Garda Nasional mempunyai pasukan terdiri dari unsur udara, darat, laut dan pasukan khusus, dan sangat terintegrasi dengan cadangan lini pertama dan kedua, serta mendukung lembaga sipil dan pasukan paramiliter.

Misi Garda Nasional adalah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk pertahanan Republik Siprus dalam menghadapi invasi yang mengancam atau tindakan apa pun yang ditujukan terhadap kemerdekaan atau integritas teritorial Republik atau mengancam untuk mengaman-kan nyawa atau harta benda. Ancaman utama bagi Siprus datang dari kehadiran dan formasi ofensif 50.000 Pasukan Turki yang ditempatkan di wilayah pulau di bawah pendudukan militer Republik Turki.

Untuk menghadapi ancaman tersebut Siprus mendapat dukungan dari Yunani yang mempertahankan penempatan 950 orang di Republik Siprus di bawah penunjukan Hellenic Force in Cyprus (ELDYK), tetapi ini bukan bagian resmi dari Garda Nasional Siprus dikarenakan sebagian besar menerima perintah dari Staf Umum Angkatan Darat Hellenic Yunani.

Berdasarkan data dan fakta, Angkatan Perang Siprus atau biasa dikenal Garda Nasional didirikan pada tahun 1964 sebagai kekuatan yang sebagian besar terdiri dari etnis Yunani. Dimana setelah krisis Siprus tahun 1963 -1964 dan rusaknya hubungan sosial dan politik antara Siprus Yunani dan Siprus Turki di pulau Siprus.

Sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Aliansi tripartit (1960) yang ditetapkan oleh Konstitusi awal 1960 -1963, Siprus berhak untuk membuat pasukan sebanyak 2.000 orang, yang terdiri dari 60% personel Yunani dan 40% personel Turki.

Tentara Siprus merupakan organisasi semi profesional dimana pasukannya direkrut dari sukarelawan dengan dinas jangka pendek. Presiden terpilih pertama Republik Siprus, Uskup Agung Makarios III, mengusulkan tiga belas amandemen konstitusi terhadap konstitusi 1960, yang akan menyesuaikan distribusi tenaga kerja dan pemungutan suara kekuasaan untuk semua layanan sipil dan militer. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan representasi dan pengaruh yang lebih besar kepada mayoritas Siprus Yunani, yang pada saat itu membentuk sekitar 82% dari penduduk asli pulau itu.



Angkatan Bersenjata Denmark

Walaupun belum sepenuhnya sebagai tentara profesional namun sejarah mencatat bahwa Garda Nasional telah beberapa kali terlibat dalam pertempuran antara lain seperti tahun 1964, dimana Siprus dan Turki terlibat dalam konfrontasi langsung dalam peperangan yang dikenal sebagai Pertempuran Tylliria, sebagai akibat dari perang saudara antara Siprus Yunani dan Siprus Turki.

Pasukan Siprus Yunani memasuki kantong Turki Kokkina dalam upaya untuk menghilangkan tempat berpijak Turki, yang mengakibatkan pertempuran selama hampir dua minggu. Selanjutnya tahun 1974, Garda Nasional juga terlibat peperangan saat Turki berusaha menginvasi Siprus dengan melakukan intervensi terhadap kudeta militer oleh Garda Nasional Siprus di Nicosia. Invasi tersebut menghasilkan dua serangan Turki

yang berpusat di Attila-1 dan Attila-2 serta satu serangan balasan Siprus Yunani yang tersebar (*Aphrodite-2*). Dalam satu bulan, pasukan Turki telah mengkonsolidasikan 38% wilayah utara pulau itu (Karena mereka sudah memiliki setelah peristiwa 1964 di Siprus), berhasil membagi dua Nicosia dan merebut Kyrenia, Morphou dan Famagusta. Pasukan Garda Nasional Siprus, didukung oleh sejumlah kecil pasukan Yunani, mampu mencegah hilangnya Nicosia (termasuk Bandara Internasional, meskipun bandara tersebut sebagian besar ELDYK) koridor Kato Pyrgos selama serangan Turki kedua, menghentikan serangan yang ditujukan ke Larnaka dan mencegah jatuhnya seluruh Famagusta.

Selain itu pada tahun 1978, pasukan komando Mesir menggerebek Bandara Internasional Larnaca dalam upaya untuk merebut sebuah pesawat Siprus Yunani yang dibajak. Pasukan komando Siprus Yunani (LOK) melawan pasukan Mesir, mengakibatkan baku tembak berkelanjutan dengan kematian 15 pasukan komando Mesir dan 3 awak udara Angkatan Udara Mesir dan tambahan 15 pasukan komando Mesir dirawat di rumah sakit, sebuah C130 dan Jeep Mesir hancur. Sejarah terbentuknya Garda nasional dan beberapa operasi yang telah dilakukan akhirnya mendorong Siprus bergabung dengan UE pada bulan Mei 2004 dan masuk Eurozone mulai Januari 2008.

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di Republik Siprus

Dalam perekrutan reserve personnel, Siprus menggunakan para laki – laki sukarelawan yang telah selesai melakukan tugas militer jangka pendek di Garda Nasional. Republik Siprus mewajibkan semua laki – laki untuk menjalani wajib militer dengan bergabung dalam Garda Nasional. Saat ini, masa bakti wajib militer yang diberlakukan adalah selama 14 bulan dan diperuntukkan hanya bagi Siprus Yunani. Secara hukum, Golongan atau komunitas Siprus Yunani terdiri dari etnis Yunani dan Siprus yang termasuk dalam tiga Golongan Kristen yaitu Armenia, Katolik Ritus Latin, dan Maronit. Sejak tahun 2008, peraturan wajib militer untuk semua anggota komunitas Siprus

Yunani dan tidak hanya untuk etnis Siprus Yunani.

Rekrutmen ini melibatkan semua pria, terlepas dari kewarganegaraan apa yang mereka miliki, dengan usia yang memenuhi syarat menjadi militer (16 tahun ke atas) dan memiliki orang tua dari keturunan Siprus serta telah memenuhi syarat untuk dinas militer. Untuk dibebaskan dari dinas militer (Wajib Militer), mereka harus mendapatkan visa keluar dari kantor Kementerian Pertahanan untuk meninggalkan Republik Siprus secara sah. Pengecualian dari dinas militer (Wajib Militer) juga dapat diberikan kepada laki-laki gay karena homoseksualitas, yang dikategorikan sebagai penyakit.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Siprus

Garda Nasional Siprus adalah kekuatan interdisipliner. Ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagaimana disebutkan di atas. Staf Umum Garda Nasional adalah hierarki tertinggi dan mencakup Kepala, Staf, Divisi dan Organisasi Senjata / Tubuh dan Unit Organisasinya. Garda Nasional Siprus sejak 2016 bertujuan untuk bergerak menuju semi profesionalisasi.

Dalam lingkup perubahan ini, waktu dinas militer dikurangi dari 24 bulan menjadi 14 bulan, sementara sekitar 12.000 tentara profesional dipekerjakan. Meski sudah lama diinginkan oleh publik, perubahan ini dikatakan tidak lebih dari kepentingan politik. Cara semi profesionalisasi yang telah dilakukan telah digambarkan sebagai tidak profesional dan melemahkan kemampuan angkatan, oleh para peneliti akademis. Pertahanan Eropa hadir di Siprus melalui Kerja Sama Terstruktur Permanen. Pemerintah telah mengusulkan untuk meningkatkan pencegahan terhadap intervensi apa pun di pulau itu. Siprus telah menyediakan pangkalan militer di Paphos dan pangkalan angkatan laut di Zygii, bersama dengan fasilitas lainnya. Ini telah ditingkatkan dan dilengkapi dengan sistem pengawasan elektronik. Untuk ukuran sebuah organisasi Militer, struktur Organisasi Garda Nasional Siprus memang terlalu

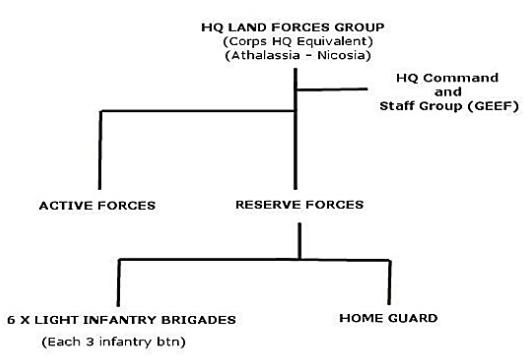
sederhana, dimana dalam operasionalnya organisasi ini mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap Reserve Personnel atau Komponen cadangan dalam operasionalnya. Berikut Struktur Organisasi garda nasional antara lain :

Pertama, Angkatan Darat yang terdiri dari sejumlah Formasi Brigade dan Grup Resimen Reguler seperti : Brigade Infanteri Mekanik ke-1 , Brigade Infanteri Mekanik ke-2, Brigade Pendukung ke-3, Brigade Infanteri ke-4, Brigade Infanteri Mekanik ke-6, Brigade Infanteri Mekanik ke-7, Brigade Lapis Baja ke-20, *Hellenic Force of Cyprus (ELDYK -)* dan Formasi Grup Mekanik (batalyon plus), Polisi Militer, Komando Pasukan Khusus, 1 Resimen Arileri, Komando Artilleri, Komando Insinyur, Departemen Musik Militer Garda Nasional,

Kedua, Angkatan Laut - terdiri dari : Komando Angkatan Laut, Unit Angkatan Laut (Administrasi Pangkalan Laut, Administrasi Pengawasan Pesisir, Komando Senjata Darurat, dan Komando Pembongkaran Bawah Laut/*Navy SEAL*).

Ketiga, Angkatan Udara - Terdiri dari : Komando Udara, Unit (termasuk Helikopter Serang - Pesawat Terbang, Patroli Angkatan Udara, Sistem Kontrol Udara, dan Tingkat Dukungan Operasional).

Komponen cadangan Siprus sendiri memiliki peran dan posisi yang sangat penting dengan struktur organisasi yang langsung berada di bawah panglima Garda Nasional serta jumlah yang melebihi tentara aktif dengan 75.000 orang sementara personel aktif hanya 12.000 orang. Dimana secara garis besar 75.000 orang reserve personel tersebut dibagi menjadi 2 yaitu 6 Brigade Infanteri Ringan (*Light Infantry brigades*) dan *Home Guard* sebagai pasukan cadangan siap gerak.



Analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

Dari uraian diatas, untuk mendapatkan pelajaran (*lesson learned*) yang diinginkan kami akan menganalisa permasalahan berdasarkan faktor Intern dan ekstern menggunakan teori Analisa SWOT yaitu *Strength* (kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang) dan *threat* (Ancaman atau Kendala) tentang peran dan penggunaan Komponen Cadangan Republik Siprus diatas, kita dapat mengetahui perkiraan Strategi yang diambil oleh Pemerintah Siprus, antara lain :

Strategi SO. Dengan kekuatan negara Siprus dimana warga negara khususnya etnis Siprus Yunani memiliki Rasa cinta tanah air yang tinggi dengan jumlah Mayoritas. Hal ini dapat dipadukan dengan peluang dan dukungan Yunani untuk mengadakan Wajib Militer bagi Warga negara lelaki yang telah memenuhi syarat.

Strategi WO. Peluang adanya potensi dalam optimalisasi peran dan penggunaan komponen cadangan dalam pertahanan negara Siprus dihadapkan dengan kelemahan terbatasnya jumlah penduduk, maka strategi yang diambil oleh Siprus adalah dengan menggunakan para tentara Yunani dalam Garda nasional sebagai bagian pasukan aktif yang siap turut serta mempertahankan negara.

Strategi ST. Dengan mempunyai kekuatan berupa kecintaan warga negara yang sangat tinggi, hal tersebut bila dihadapkan dengan ancaman yang paling mungkin terjadi yaitu konflik terbuka dengan Turki, maka pemerintah Siprus memberlakukan penerapan dimana anggota Militer aktif dan cadangan 40% nya diisi oleh etnis Siprus Turki.

Strategi WT. Adanya ancaman perang terbuka dengan Turki serta kelemahan dengan minimnya sumberdaya manusia yang dapat digunakan sebagai personel aktif maupun komponen cadangan, maka strategi Pemerintah Turki adalah membangun hubungan dan menjalin koalisi dengan beberapa negara tetangga dan negara besar guna mendapatkan dukungan bila terjadi Konflik atau bahkan perang seperti Yunani, Amerika serikat dan Inggris..

Penutup.

Berdasarkan pembahasan dan analisa SWOT yang telah diuraikan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat kita pelajari, antara lain: Pertama, bahwa seluruh warga Siprus Yunani menjalani wajib militer dengan jangka pendek yaitu 14 bulan dimana setelah menjalani wajib militer tersebut mereka dikembalikan ke masyarakat namun beberapa diantaranya secara sukarela tetap menjadi bagian garda nasional sebagai Komponen Cadangan atau reserve personnel Kedua, Republik Siprus menempatkan komponen cadangan sebagai organisasi yang sangat vital dalam peran pertahanan negara menghadapi ancaman dari luar, dimana jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah Personel/Tentara Aktif. Ketiga, Bahwa dalam mengatasi masalah pertahanan negaranya, Pemerintahan Republik Siprus membangun hubungan dengan Yunani Khususnya dalam pemenuhan prajurit aktif dan pelatihan bagi Reserve Personnel.

Dengan mempelajari peran dan penggunaan Komponen Cadangan Republik Siprus ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dan sekaligus sebagai saran terhadap pemerintah khususnya TNI dalam menerapkan sistem komponen cadangan antara lain :

Pertama, Memperbanyak perekrutan komponen cadangan untuk ditempatkan sebagai pasukan pelapis TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU yang siap dimobilisasi kapan dan dimana saja.

Kedua, Merekrut para pemuda yang mempunyai bakat dan kemampuan lebih khususnya di bidang teknologi untuk menjadi Komponen Cadangan,

Ketiga, Memberikan uang saku atau gaji yang layak bagi para personel yang dilibatkan dalam komponen cadangan guna menjaga moril para personel.

**Major Inf Acuk Andrianto, S.E. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**



“To be prepared for war, is one of the most effective means of preserving peace”.
(Bersiaplah untuk perang adalah salah satu cara paling efektif untuk melestarikan perdamaian)

George Washington (1732-1799)



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295